LAPORAN KEUANGAN

UAKPA 097713

TAHUN 2024 *(AUDITED)*



PENGADILAN TINGGI SEMARANG

JALAN PAHLAWAN NO. 19 SEMARANG

Website : http://pt-semarang.go.id

Email : pt.jateng@gmail.com

PENGADILAN TINGGI SEMARANG

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024

UAKPA 097713

Jalan Pahlawan No. 19 Semarang

Jawa Tengah 5024

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Peraturan Menteri Keuangan No.222/PMK.05/2016 bahwa seluruh unit akuntansi wajib Menyusun laporan keuangan semester/tahunan dari tingkat UAKPA, UAPPA-W, UAPPA-E1, dan UAPA.

Pengadilan Tinggi Semarang adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Semarang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Tinggi Semarang. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance).*

Semarang, 7 Mei 2025

Kuasa Pengguna Anggaran

Drs. MUHAMAD ASHAR, M.H.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
Pernyataan Tanggung Jawab iii
Daftar Tabel iv
Ringkasan 1
I. Laporan Realisasi Anggaran 1
II. Neraca 1
III. Laporan Operasional 2
IV. Laporan Perubahan Ekuitas..... 2
V. Catatan Atas Laporan Keuangan 2
A. Penjelasan Umum 8
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran 20
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca 41
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional 96
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas 116
F. Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya 123
VI. Lampiran dan daftar

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

PENGADILAN TINGGI SEMARANG
JL. PAHLAWAN NO. 19 SEMARANG
TELEPON 024 8311458, FAX. 024 8311459

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Semarang yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Semarang, 7 Mei 2025

Kuasa Pengguna Anggaran



Drs. MUHAMAD ASHAR, M.H.

DAFTAR TABEL

Tabel 1	*Rincian Penyisihan*	15
Tabel 2	*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap*	17
Tabel 3	*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud*	18
Tabel 4	*Rincian Perubahan DIPA per 31 Desember 2024*	20
Tabel 5	*Daftar Alokasi Anggaran Pendapatan Negara per Satuan Kerja Korwil Jawa Tengah 31 Desember 2024*	21
Tabel 6	*Daftar Alokasi Anggaran Belanja Negara per Satuan Kerja Korwil Jawa Tengah 31 Desember 2024*	22
Tabel 7	*Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2024*	24
Tabel 8	*Perbandingan Realisasi Pendapatan Periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023*	24
Tabel 9	*Realisasi Pendapatan per satuan kerja korwil Jawa Tengah Periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023*	25
Tabel 10	*Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja 31 Desember 2024*	27
Tabel 11	*Perbandingan Realisasi Belanja Negara (netto) 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023*	27
Tabel 12	*Realisasi Belanja per satuan kerja korwil Jawa Tengah 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023*	28
Tabel 13	*Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023*	30
Tabel 14	*Rincian Realisasi Belanja Pegawai per Satuan Kerja Korwil Jawa Tengah Periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023*	30
Tabel 15	*Perbandingan Realisasi Belanja Barang Periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023*	32
Tabel 16	*Realisasi Belanja Barang per Satuan Kerja Korwil Jawa*	34

	Tengah Periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	
Tabel 17	*Perbandingan Realisasi Belanja Modal periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023*	36
Tabel 18	*Realisasi Belanja Modal per Satuan Kerja Korwil Jawa Tengah Periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023*	37
Tabel 19	*Perbandingan Realisasi Belanja Modal periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023*	38
Tabel 20	*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023*	39
Tabel 21	*Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023*	40
Tabel 22	*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023*	41
Tabel 23	*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran masing-masing satuan kerja di wilayah Jawa Tengah per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.*	42
Tabel 24	*Rincian kas lainnya dan setara kas satuan kerja di wilayah Jawa Tengah per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.*	44
Tabel 25	*Rincian Belanja Barang yang dibayar dimuka (prepaid) Periode 31 Desember 2024 dan 2023*	44
Tabel 26	*Rincian Belanja Barang yang dibayar dimuka (prepaid) Satuan Kerja Korwil Jawa Tengah periode 31 Desember 2024 dan 2023*	45
Tabel 27	*Rincian Piutang Bukan Pajak periode 31 Desember 2024 dan 2023*	45
Tabel 28	*Satuan Kerja Korwil Jawa Tengah yang memiliki Piutang Bukan Pajak periode 31 Desember 2024 dan 2023*	46
Tabel 29	*Rincian Piutang Bukan Pajak (Netto) periode 31 Desember 2024 dan 2023*	47
Tabel 30	*Satuan Kerja yang memiliki Piutang Bukan Pajak (netto) Periode 31 Desember 2024 dan 2023*	47

Tabel 31	*Rincian Persediaan periode 31 Desember 2024 dan 2023*	49
Tabel 32	*Rincian Persediaan per Satuan Kerja di Korwil Jawa Tengah Periode 31 Desember 2024 dan 2023*	49
Tabel 33	*Rincian Persediaan belum diregister satuan kerja di wilayah Jawa Tengah periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023*	51
Tabel 34	*Rincian Aset Tetap periode 31 Desember 2024 dan 2023*	52
Tabel 35	*Rincian Mutasi Tanah periode 31 Desember 2024*	52
Tabel 36	*Tanah per Satuan kerja korwil Jawa Tengah Periode 31 Desember 2024 dan 2023*	55
Tabel 37	*Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin periode 31 Desember 2024*	57
Tabel 38	*Rincian Pembelian Peralatan dan Mesin per satuan kerja korwil Jawa Tengah periode 31 Desember 2024*	58
Tabel 39	*Hibah Masuk per Satuan Kerja Korwil Jawa Tengah periode 31 Desember 2024*	58
Tabel 40	*Transfer masuk per satuan kerja korwil Jawa Tengah periode 31 Desember 2024*	59
Tabel 41	*Reklasifikasi masuk Peralatan dan Mesin per Satuan Kerja korwil Jawa Tengah periode 31 Desember 2024*	60
Tabel 42	*Reklasifikasi keluar Peralatan dan Mesin per Satuan Kerja Korwil Jawa Tengah periode 31 Desember 2024*	62
Tabel 43	*Perbandingan Aset Tetap Peralatan dan Mesin per Satuan Kerja Korwil Jawa Tengah periode 31 Desember 2024 dan 2023*	63
Tabel 44	*Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan periode 31 Desember 2024*	65
Tabel 45	*Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan periode 31 Desember 2024*	69
Tabel 46	*Aset Tetap Gedung dan Bangunan per satuan kerja korwil Jawa Tengah 31 Desember 2024 dan 2023*	69
Tabel 47	*Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya periode 31 Desember*	72

	2024	
Tabel 48	*Rincian Aset Tetap Lainnya periode 31 Desember 2024*	72
Tabel 49	*Aset Tetap Lainnya per satuan kerja korwil Jawa Tengah Periode 31 Desember 2024 dan 2023*	72
Tabel 50	*Rincian Daftar Konstruksi Dalam Pengerjaan periode 31 Desember 2024*	74
Tabel 51	*Satuan Kerja yang memiliki KDP periode 31 Desember 2024*	75
Tabel 52	*Rincian Akumulasi Penyusunan Aset Tetap periode 31 Desember 2024 dan 2023*	76
Tabel 53	*Akumulasi Penyusunan Aset Tetap per satuan kerja korwil Jawa Tengah periode 31 Desember 2024 dan 2023*	76
Tabel 54	*Rincian Aset Lainnya periode 31 Desember 2024 dan 2023*	78
Tabel 55	*Rincian Aset Tak Berwujud 31 Desember 2024*	78
Tabel 56	*Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud periode 31 Desember 2024*	79
Tabel 57	*Aset Tak Berwujud per satuan kerja korwil Jawa Tengah Periode 31 Desember 2024 dan 2023*	79
Tabel 58	*Rincian Aset Lain-Lain periode 31 Desember 2024*	81
Tabel 59	*Rincian Mutasi Aset Lain-lain periode 31 Desember 2024*	81
Tabel 60	*Aset Lain-lain per satuan kerja korwil Jawa Tengah Periode 31 Desember 2024 dan 2023*	82
Tabel 61	*Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset Lainnya periode 31 Desember 2024*	83
Tabel 62	*Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset Lainnya per satuan kerja korwil Jawa Tengah periode 31 Desember 2024 dan 2023*	84
Tabel 63	*Rincian Kewajiban Jangka Pendek perode 31 Desember 2024 dan 2023*	85
Tabel 64	*Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga periode 31 Desember 2024 dan 2023*	86
Tabel 65	*Rincian Utang kepada Pihak Ketiga per Satuan Kerja Korwil Jawa Tengah periode 31 Desember 2024 dan 2023*	87

Tabel 66	*Rincian Utang yang belum ditagihkan pada satuan kerja di wilayah Jawa Tengah periode 31 Desember 2024 dan TA 2023.*	89
Tabel 67	*Rincian hibah yang belum disahkan satuan kerja diwilayah Jawa Tengah periode 31 Desember 2024 dan 2023*	90
Tabel 68	*Rincian Uang Muka dari KPPN dari Satuan Kerja di Wilayah Jawa Tengah periode 31 Desember 2024 dan 2023*	91
Tabel 69	*Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya satuan kerja di wilayah Jawa Tengah periode 31 Desember 2024 dan 2023*	93
Tabel 70	*Perbandingan Ekuitas periode 31 Desember 2024 dan 2023*	94
Tabel 71	*Ekuitas per Satuan Kerja Korwil Jawa Tengah Periode 31 Desember 2024 dan TA 2023*	94
Tabel 72	*Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023*	96
Tabel 73	*Pendapatan Negara Bukan Pajak per Satuan Kerja Korwil Jawa Tengah periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023*	97
Tabel 74	*Rincian Beban Pegawai periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023*	98
Tabel 75	*Beban Pegawai per Satuan Kerja Korwil Jawa Tengah Periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023*	100
Tabel 76	*Rincian Beban Persediaan per satuan kerja korwil Jawa Tengah Periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023*	101
Tabel 77	*Beban Persediaan per satuan kerja korwil Jawa Tengah Periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023*	102
Tabel 78	*Rincian Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023*	104
Tabel 79	*Beban Barang dan Jasa per Satuan Kerja Korwil Jawa Tengah Periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023*	105
Tabel 80	*Rincian Beban Pemeliharaan periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023*	107
Tabel 81	*Beban Pemeliharaan per Satuan Kerja Korwil Jawa Tengah*	108

	Periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	
Tabel 82	*Rincian Beban Perjalanan Dinas periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023*	110
Tabel 83	*Beban Perjalanan Dinas per Satuan Kerja Korwil Jawa Tengah Periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023*	111
Tabel 84	*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023*	113
Tabel 85	*Beban Penyusutan dan Amortisasi per satuan kerja korwil Jawa Tengah periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023*	113
Tabel 86	*Rincian Kegiatan Non Operasional periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023*	115
Tabel 87	*Rincian Koreksi Atas Reklasifikasi periode 31 Desember 2024*	117
Tabel 88	*Perbandingan Koreksi Aset Non Revaluasi periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023*	118
Tabel 89	*Koreksi Aset Non Revaluasi per satuan kerja korwil Jawa Tengah Periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023*	118
Tabel 90	*Transaksi Antar Entitas periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023*	121
Tabel 91	*Transaksi Antar Entitas per Satuan Kerja Korwil Jawa Tengah Periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023*	121
Tabel 92	*Rincian ketidaksesuaian kode akun vs BMN per satuan kerja korwil Jawa Tengah TA 2023*	125

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2 013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Semarang Tahun 2024 *(audited)* ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Juli sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara per 31 Desember 2024 adalah berupa pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp24.728.562,00 atau mencapai 54,39 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp45.466.000,00.

Realisasi Belanja Negara per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp48.679.150.782,00 atau mencapai 99,4 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp48.974.451.000,00.

NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 31 Desember 2024 dan 2023.

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp274.543.681.512,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp149.982.400,00. Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp274.393.699.112,00 dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp9.530.569,00 yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp9.530.569,00 dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp0.

Nilai Ekuitas disajikan sebesar Rp274.534.150.943.

LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan non operasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp24.032.612, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp30.463.011.423, sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp30.438.978.811). Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp1.856.580 dan sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami defisit -LO sebesar (Rp30.437.122.231).

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2024 adalah sebesar Rp278.348.051.136 dikurangi surplus(defisit)-LO sebesar (Rp30.437.122.231) dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp24.267.863.814. Penurunan ekuitas sebesar (Rp6.169.258.417) sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp272.178.792.719.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar rincian atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian indormasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UAKPA 097713 PENGADILAN TINGGI SEMARANG

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2024 DAN 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	Cat.	31-Dec-24				31-Dec-23
			ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	REALISASI
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	B.1.					
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	B.1.1.	45.466.000,00	24.728.562,00	(20.737.438,00)	54,39	21.087.692,00
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH (B.1)		45.466.000,00	24.728.562,00	(20.737.438,00)	54,39	21.087.692,00
B	BELANJA	B.2.					
	BELANJA PEGAWAI	B.2.1	41.823.736.000,00	41.638.801.326,00	(184.934.674,00)	99,56	34.520.466.379,00
	BELANJA BARANG	B.2.2	6.951.070.000,00	6.841.215.345,00	(109.854.655,00)	98,42	6.839.704.409,00
	BELANJA MODAL	B.2.3.	199.645.000,00	199.134.111,00	(510.889,00)	99,74	570.272.661,00
	JUMLAH BELANJA (B3+B4+B5		**48.974.451.000,00**	**48.679.150.782,00**	**(295.300.218,00)**	99,40	**41.930.443.449,00**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

II. NERACA

UAKPA 097713 PENGADILAN TINGGI SEMARANG

NERACA

PER 31 Desember 2024 DAN 31 Desember 2023

NAMA PERKIRAAN	Catatan	JUMLAH	
		30 SEPTEMBER 2024	31 Desember 2023
ASET			
ASET LANCAR	**C.1**		
Persediaan	C.1.1	149.982.400,00	45.161.000,00
JUMLAH ASET LANCAR		**149.982.400,00**	**45.161.000,00**
ASET TETAP	**C.2**		
Tanah	C.2.1	262.154.346.000,00	264.758.346.000,00
Peralatan dan Mesin	C.2.2	9.582.828.721,00	9.562.328.721,00
Gedung dan Bangunan	C.2.3	15.522.987.792,00	15.821.808.681,00
Aset Tetap Lainnya	C.2.4	82.956.742,00	82.956.742,00
AKUMULASI PENYUSUTAN	C.2.5	(12.949.420.143,00)	(11.845.269.545,00)
JUMLAH ASET TETAP		**274.393.699.112,00**	**278.380.170.599,00**
ASET LAINNYA	**C.3**		
Aset Tak Berwujud	C.3.1	136.200.000,00	136.200.000,00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	C.3.2	(136.200.000,00)	(136.200.000,00)
JUMLAH ASET LAINNYA		**0,00**	**0,00**
JUMLAH ASET		**274.543.681.512,00**	**278.425.331.599,00**
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**C.4**		
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4.1	3.800.846,00	62.993.741,00
Pendapatan diterima dimuka	C.4.2	5.729.723,00	14.286.722,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		**9.530.569,00**	**77.280.463,00**
JUMLAH KEWAJIBAN		**9.530.569,00**	**77.280.463,00**
EKUITAS			
EKUITAS	**C.5**		
Ekuitas	C.5	274.534.150.943,00	278.348.051.136,00
JUMLAH EKUITAS		**274.534.150.943,00**	**278.348.051.136,00**
JUMLAH EKUITAS		**274.534.150.943,00**	**278.348.051.136,00**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**274.543.681.512,00**	**278.425.331.599,00**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

UAKPA 097713 PENGADILAN TINGGI SEMARANG

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN	Catatan	30 Juni 2024	30 Juni 2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	32.479.706,00	39.021.357,00
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak		32.479.706,00	39.021.357,00
JUMLAH PENDAPATAN		32.479.706,00	39.021.357,00
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.2	34.621.107.969,00	29.617.646.807,00
Beban Persediaan	D.3	80.543.500,00	119.959.152,00
Beban Barang dan Jasa	D.4	4.269.121.899,00	4.300.032.875,00
Beban Pemeliharaan	D.5	1.053.275.896,00	930.349.942,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6	284.927.214,00	296.552.754,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	622.779.568,00	673.763.411,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih		0,00	0,00
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat		0,00	0,00
JUMLAH BEBAN		**40.931.756.046,00**	**35.938.304.941,00**
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		**(40.899.276.340,00)**	**(35.899.283.584,00)**
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		0,00	0,00
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		0,00	0,00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		0,00	0,00
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		2.454.270,00	3.388.140,00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		2.454.270,00	3.388.140,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0,00	0,00
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.8	**2.454.270,00**	**3.388.140,00**
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		**(40.896.822.070,00)**	**(35.895.895.444,00)**
POS LUAR BIASA		0,00	0,00
Beban Luar Biasa	D.9	0,00	0,00
POS LUAR BIASA		**0,00**	**0,00**
SURPLUS/DEFISIT - LO		**(40.896.822.070,00)**	**(35.895.895.444,00)**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UAKPA 097713 PENGADILAN TINGGI SEMARANG

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2024 DAN 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	0,00	1.515.004.775,00
PENYESUAIAN NILAI ASET		0,00	0,00
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.4	0,00	0,00
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.4.1	0,00	0,00
SELISIH REVALUASI ASET		0,00	0,00
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.4.2	0,00	1.515.004.775,00
LAIN-LAIN	E.4.3	0,00	0,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	34.756.807.948,00	32.982.249.670,00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(6.140.014.122,00)	(1.398.640.999,00)
EKUITAS AKHIR	**E.6**	**272.208.037.014,00**	**276.230.219.658,00**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Dasar Hukum

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan.
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat.

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
11. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
13. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1330/SEK/SK/XII/2021 tentang Pedoman akuntansi berbasis akrual dan pelaporan keuangan di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
14. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-8/PB/2023 tentang Tata Cara Monitoring Kualitas Data Laporan Keuangan, Rekonsiliasi, dan Penyampaikan Laporan Keuangan pada Kementerian/Lembaga.

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh satuan kerja Pengadilan Tinggi Semarang. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi

mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan.

Tahun 2024 untuk pelaporan keuangan maupun pelaporan aset sudah menggunakan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Aplikasi SAKTI ini terdiri dari beberapa modul seperti Modul Administrator, Modul Penganggaran, Modul Komitmen, Modul Pembayaran, Modul Bendahara, Modul Persediaan, Modul Aset Tetap, Modul Piutang dan Modul GL Pelaporan. Setiap modul memiliki peran dan fungsi masing-masing, dimana databasenya sudah terpusat. Hal ini meminimalisir adanya kekeliruan atau kesalahan dalam proses penginputan yang dilakukan secara manual. Antar modul saling berkaitan.

Modul GL Pelaporan dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Wilayah maupun Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan Modul Persediaan dan Aset Tetap adalah sistem yang menghasilkan informasi mengenai aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan Neraca dan Laporan Barang Milik Negara serta Laporan Manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Pengadilan Tinggi Semarang menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Tinggi Semarang dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah, transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5 Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konsekuensi-konsekuensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Tinggi Semarang. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Koordinator Wilayah Pengadilan Tinggi Semarang adalah sebagai berikut :

Pendapatan – LRA

(1) Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan – LO

(2) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan Pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keaungan adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode sewa.
c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber.

Belanja

(3) Belanja

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Belanja disajikan menurut klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan dungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesiapada tanggal neraca;
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

1) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan Ganti Rugi, apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
2) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
3) Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut :

Tabel 1

Rincian Penyisihan

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidakdilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggalSurat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan
  1) Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  2) Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  3) Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Nilai Aset Tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut :
  1) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  2) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
  3) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai

minimum kapitalisasi tersebut diatas, diperlakukan sebagai biaya, kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak dipergunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikiasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap :
  1) Tanah;
  2) Konstruksi dalam pengerjaan (KDP); dan
  3) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

- Penghitungan dan pencatatan Penyusunan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester

selama Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Tabel 2

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan

intelektual.

- ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil, sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2021 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Tabel 3

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat
Software Komputer	4 tahun
Franchise	5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 tahun
Hak Ekonomi, Lembaga Penyiaran, PatenBiasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70 tahun

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

Kewajiban Pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam

waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi utang kepada pihak ketiga, belanja yang masih harus dibayar, pendapatan diterima di muka, bagian lancar utang jangka panjang, dan utang jangka pendek lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Penjelasan Atas Pos-Pos Realisasi Anggaran

Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Semarang memperoleh alokasi anggaran pendapatan sebesar Rp45.466.000,00 dan belanja negara sebesar Rp49.224.794.000,00 selama Triwulan III tahun 2024, seiring dengan berjalannya waktu, dilakukan revisi atas DIPA awal masing-masing Satuan Kerja di wilayah Pengadilan Tinggi Semarang yang disebabkan adanya *Refocussing,* penghematan belanja pemerintah serta realokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Angaran awal dan anggaran setelah revisi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4
Rincian Perubahan DIPA per 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2024	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Negara Bukan Pajak	45.466.000,00	45.466.000,00
Jumlah Pendapatan	**45.466.000,00**	**45.466.000,00**
Belanja		
Belanja Pegawai	35.771.639.000	41.823.736.000
Belanja Barang	6.753.510.000	6.951.070.000
Belanja Modal	0	199.645.000
Jumlah Belanja	**42.525.149.000**	**48.974.451.000**

Untuk anggaran pendapatan per 31 Desember 2024 tidak mengalami perubahan. Sedangkan anggaran belanja per 31 Desember 2024 mengalami perubahan berupa kenaikan anggaran pada pagu belanja pegawai dan belanja barang. Hal ini dilakukan dengan mengajukan revisi anggaran.

B.1. Pendapatan

Realisasi Pendapatan Rp24.728.562,00

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp24.728.562,00 atau mencapai 54,4 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp21.087.692,00. Pendapatan Pengadilan Tinggi Semarang selaku

terdiri dari Pendapatan dari penjualan, pengelolaan BMN, Iuran Badan usaha, dll serta Pendapatan lain-lain. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN	%
42	**PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK**			
4251	**Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, luran Badan Usaha dan**			
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	45.466.000,00	22.274.292,00	48,99
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	45.466.000,00	22.274.292,00	48,99
4259	**Pendapatan Lain-Lain**			
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	2.454.270,00	Infinity
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	0,00	0
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0,00	0,00	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0,00	2.454.270,00	Infinity
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	0,00	2.454.270,00	54,39
	JUMLAH PENDAPATAN	**45.466.000,00**	**24.728.562,00**	**54,39**

Adapun rincian perbandingan realisasi pendapatan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 6

Perbandingan Realisasi Pendapatan

Periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

KODE	URAIAN	REALISASI 31 Desember 2024	REALISASI 31 Desember 2023	%
42	**PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK**			
4251	**Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, luran Badan Usaha dan**			
425121	Pendapatan dari penjualan Tanah, Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN lainnya	0,00	0,00	0,00
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	45.466.000,00	17.699.552,00	156,88
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	45.466.000,00	17.699.552,00	156,88

4259	**Pendapatan Lain-Lain**			
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	2.454.270,00	3.388.140,00	(27,56)
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	0,00	0,00
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	2.454.270,00	3.388.140,00	(27,56)
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	24.728.562,00	21.087.692,00	17,27
	JUMLAH PENDAPATAN	**24.728.562,00**	**21.087.692,00**	**17,27**

Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar 17,27 persen dibandingkan 31 Desember 2023. Hal ini disebabkan oleh beberapa pendapatan yang tidak terealisasi pada periode 31 Desember 2024 seperti Pendapatan dari pemindahtanganan BMN lainnya, Penjualan peralatan dan mesin dan Pendapatan dari penjualan Tanah, Gedung dan Bangunan.

Sedangkan pendapatan dari pendapatan sewa tanah, gedung, dan bangunan dan penerimaan kembali belanja pegawai TAYL mengalami kenaikan yang sangat signifikan karena meningkatnya pendapatan sewa tanah, gedung, dan bangunan.

B.2. Belanja

Realisasi Belanja Negara Rp48.679.150.782,

Realisasi belanja negara di Pengadilan Tinggi Semarang pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp48.679.150.782,00 atau 99,4 persen dari anggaran belanja sebesar Rp48.974.451.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 7

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2024		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	41.823.736.000,00	41.638.801.326,00	99,6
Belanja Barang	6.951.070.000,00	6.841.215.345,00	98,4
Belanja Modal	199.645.000,00	199.134.111,00	-
Total Belanja Kotor	**48.974.451.000,00**	**37.730.526.440,00**	**99,7**
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	-

Total Belanja Netto	**48.974.451.000,00**	**48.679.150.782,00**	**99,7**

Adapun Perbandingan Realisasi Belanja Negara (*netto*) 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 8

Perbandingan Realisasi Belanja Negara (netto)

31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	%
Belanja Pegawai	41.823.736.000,00	34.520.466.379,00	21,16
Belanja Barang	6.951.070.000,00	6.839.704.409,00	1,63
Belanja Modal	199.645.000,00	570.272.661,00	(64,99)
Jumlah	**48.974.451.000,00**	**41.930.443.449,00**	**16,80**

Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar 16,80 Persen dibandingkan dengan periode yang berakhir 31 Desember 2023. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan anggaran belanja pegawai, dikarenakan terdapat penambahan anggaran untuk gaji pegawai PPPK serta adanya peningkatan anggaran belanja barang.

B.2.1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai Rp41.638.801.326,00

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp41.638.801.326,00 dan Rp34.520.466.379,00.

Belanja pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kinerja (PPPK) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai 31 Desember 2024

dan 31 Desember 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 9

Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai

31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

KODE	URAIAN	REALISASI BELANJA		%
		31 Desember 2024	31 Desember 2023	
51	**BELANJA PEGAWAI**			
5111	**Belanja Gaji dan Tunjangan PNS**			
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	7.498.626.260,00	6.462.965.000,00	16,02
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	95.037,00	72.252,00	31,54
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	531.596.254,00	454.840.910,00	16,88
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	53.691.854,00	54.364.294,00	(1,24)
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	87.230.000,00	84.890.000,00	2,76
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	17.874.708.000,00	15.224.310.000,00	17,41
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	3.930.693.941,00	2.998.111.188,00	31,11
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	223.922.640,00	213.783.840,00	4,74
511129	Belanja Uang Makan PNS	766.230.000,00	697.625.000,00	9,83
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	52.165.000,00	57.135.000,00	(8,70)
511158	Belanja Tunjangan Hakim Ad Hoc	914.500.000,00	1.134.200.000,00	(19,37)
5116				
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	105.718.800,00	0,00	100,00
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.842,00	0,00	100,00
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	3.523.960,00	0,00	100,00
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	0,00	0,00	100,00
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	17.083.000,00	0,00	100,00
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	3.186.480,00	0,00	100,00
511628	Belanja Uang Makan PPPK	16.243.000,00	0,00	100,00
	Jumlah Belanja Pegawai Kotor	**32.079.216.068,00**	**27.382.297.484,00**	**17,15**
	Pengembalian Belanja	**34.748.142,00**	**3.537.116,00**	**882,39**
	Jumlah Belanja Pegawai Netto	**32.044.467.926,00**	**27.378.760.368,00**	**17,04**

Realisasi belanja pegawai periode 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar 17,04 persen dari periode 31 Desember 2023. Hal ini disebabkan adanya perpindahan pegawai maupun Hakim ke Pengadilan Tinggi Semarang yang menyebabkan meningkatnya realisasi anggaran belanja pegawai gaji dan uang makan.

B.2.2. Belanja Barang

Belanja Barang Rp58.087.354.957,00

Realisasi Belanja Barang yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp5.686.558.514,00 dan Rp5.598.954.296,00.

Rincian Perbandingan Belanja Barang 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 10

Perbandingan Realisasi Belanja Barang

Periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

KODE	URAIAN	REALISASI BELANJA		%
		31 Desember 2024	31 Desember 2023	
52	**BELANJA BARANG**			
5211	**Belanja Barang Operasional**			
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	520.599.611,00	21.945.278.504,00	(2,18)
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	0,00	3.809.000,00	(100,00)
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	16.621.450,00	125.392.961,00	(3,24)
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	60.352.000,00	2.000.009.500,00	(29,06)
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	74.153.100,00	405.764.266,00	1,95
5212	**Belanja Barang Non Operasional**			
521211	Belanja Bahan			
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya			
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel			
521253	Belanja Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel			
5218	**Belanja Barang Persediaan**			
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi			
5221	**Belanja Jasa**			
522111	Belanja Langganan Listrik			
522112	Belanja Langganan Telepon			
522113	Belanja Langganan Air			
522141	Belanja Sewa			
522151	Belanja Jasa Profesi			
522191	Belanja Jasa Lainnya			
5231	**Belanja Pemeliharaan**			
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan			
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya			
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin			
5241	**Belanja Perjalanan Dalam Negeri**			
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota			
	Jumlah Belanja Barang Bruto			
	Pengembalian Belanja			
	Jumlah Belanja Barang Netto			

Belanja Modal Rp7.727.778.650,00

Realisasi Belanja Barang periode 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar sebesar 0,38 persen dari Realisasi Belanja Barang periode 31 Desember 2023. Hal ini disebabkan antara lain :

1. Adanya pengurangan anggaran belanja barang berupa penanganan dan penanggulangan Covid 19 pada belanja barang operasional dan belanja jasa. Hal ini disebabkan karena adanya pencabutan Pandemi Covid 19 yang dilakukan oleh Pemerintah RI. Semua anggaran mengenai penanggulangan dan penanganan Pandemi Covid 19 pada tahun 2023 wajib di revisi untuk anggaran lainnya.

Belanja Modal Tanah RpNihil

2. Adanya pengurangan anggaran untuk belanja perjalanan dinas dalam negeri berupa pagu belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota.
3.

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp3.450.000,00

B.2.3. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp7.727.778.650,00 dan Rp5.484.483.922,00. Adapun rincian perbandingan belanja modal periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 13

Perbandingan Realisasi Belanja Modal

periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

KODE	URAIAN	REALISASI BELANJA		%
		31 Desember 2024	31 Desember 2023	
53	**BELANJA MODAL**			
5321	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**			
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.450.000,00	5.310.756.400,00	(99,94)
5331	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**			
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00		0,00

533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	7.724.328.650,00	173.727.522,00	4.346,23
	Jumlah Belanja Modal Bruto	**7.727.778.650,00**	**5.484.483.922,00**	**40,90**
	Jumlah Pengembalian Belanja Modal	**0,00**	**0**	**0**
	Jumlah Belanja Modal Netto	**7.727.778.650,00**	**5.484.483.922,00**	**40,90**

Realisasi Belanja Modal pada periode 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar 40,90 persen dibandingkan 31 Desember 2023 disebabkan oleh terdapat kenaikan realisasi belanja modal Penambahan Nilai Gedung dan bangunan karena beberapa satuan kerja terdapat penambahan anggaran ABT pada Semester I Tahun 2023 guna renovasi gedung dan bangunan.

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp7.724.328.650,00

B.2.3.1. Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp*Nihil* dan *Nihil*. Realisasi pada periode 31 Desember 2024 mengalami peningkatan dibandingkan periode 31 Desember 2023.

B.2.3.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin periode 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp3.450.000,00 mengalami penurunan sebesar 99,94 persen bila dibandingkan dengan realisasi periode 31 Desember 2023 sebesar Rp5.310.756.400,00.

Rincian realisasi belanja modal peralatan dan mesin periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 dapat dilihat melalui tabel berikut :

Tabel 15

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

Kode	Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	%
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.450.000,00	5.310.756.400,00	(99,94)
Jumlah Belanja Kotor		**3.450.000,00**	**5.310.758.400,00**	**(99,94)**

Pengembalian Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Modal	**3.450.000,00**	**5.310.758.400,00**	**(99,94)**

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin periode 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar 99,94 persen dibandingkan periode 31 Desember 2023. Hal ini disebabkan adanya penurunan anggaran belanja modal peralatan dan mesin yang diterima oleh satuan kerja di wilayah Jawa Tengah. Adapun satuan kerja yang mendapatkan anggaran belanja modal peralatan dan mesin adalah Pengadilan Negeri Klaten.

B.2.3.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp7.724.328.650,00 dan Rp173.727.522,00.

Tabel 17

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

Kode	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	%
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	7.724.328.650,00	173.727.522,00	4.346,23
Jumlah Belanja Kotor		**7.724.328.650,00**	**173.727.522,00**	**4.346,23**
Pengembalian Belanja Modal		**0,00**	**0,00**	**0**
Jumlah Belanja Modal		**7.724.328.650,00**	**173.727.522,00**	**4.346,23**

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan periode 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar 4.346,23 persen dibandingkan Realisasi periode 31 Desember 2023. Belanja Gedung dan Bangunan ini berasal dari renovasi gedung dan bangunan kantor untuk para pegawai dan meningkatkan kapasitas Gedung Kantor guna adanya penambahan pegawai baru.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. Aset Lancar

Aset Lancar Rp149.982.400,00

Jumlah Aset lancar di Pengadilan Tinggi Semarang periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp149.982.400,00 dan Rp45.161.000,00.

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

C.1.6. Persediaan

Persediaan sebesar Rp149.982.400,00

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan di lingkungan Mahkamah Agung RI terdiri dari dua jenis yakni Barang konsumsi yaitu barang habis pakai dan Barang untuk pemeliharaan yang digunakan untuk mempertahankan fungsi dari suatu gedung dan bangunan.

Nilai Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp149.982.400,00 dan Rp45.161.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 21

Rincian Persediaan periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

Akun	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	%
117111	Barang Konsumsi	113.120.400,00	42.476.000,00	166,32
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	36.862.000,00	2.685.000,00	1.272,89
JUMLAH		**149.982.400,00**	**45.161.000,00**	**232,11**

Persediaan pada periode 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar 232,11 persen dari 31 Desember 2023. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan anggaran untuk persediaan. Semua

jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

C.2. Aset tetap

Aset tetap sebesar Rp274.393.699.112,00

Saldo Aset Tetap di Pengadilan Tinggi Semarang per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp274.393.699.112,00 dan Rp278.380.170.599,00.

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset Tetap pada Pengadilan Tinggi Semarang berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan /Bangunan, dan Aset Tetap Lainnya.

Tabel 22

Rincian Aset Tetap periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

Rincian Aset Tetap	31 Desember 2024	31 Desember 2023	%
Tanah	262.154.346.000, 00	264.758.346.000,00	(0,98)
Peralatan dan Mesin	9.582.828.721,00	9.562.328.721,00	0,21
Gedung dan Bangunan	15.522.987.792,00	15.821.808.681,00	(1,89)
Aset Tetap Lainnya	82.956.742,00	82.956.742,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(12.949.420.143,00)	(11.845.269.545,00)	9,32
Jumlah	**274.393.699.112,00**	**278.380.170.599,00**	**(1,43)**

Aset tetap pada periode 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar 1,43 persen dibandingkan tahun 2023. Hal ini disebabkan adanya penurunan yang signifikan pada aset tetap karena pada periode 31 Desember 2024 terdapat peningkatan akumulasi penyusutan peralatan dan mesin, gedung dan bangunan serta beberapa aset tetap mengalami penurunan.

C.2.1. Tanah

Tanah Rp262.154.346.000,00

Tanah yang dimiliki oleh Pengadilan Tinggi Semarang per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp262.154.346.000,00 dan Rp264.758.346.000,00.

Aset tetap berupa Tanah pada periode 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar 0,98 persen dibandingkan TA 2023.

Hal ini disebabkan adanya penambahan transaksi mutasi berkurang pada periode 31 Desember 2024 berupa Hibah Keluar, transfer keluar dan reklasifikasi keluar.

Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut :

Tabel 23

Rincian Mutasi Tanah periode 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2023	**264.758.346.000,00**
Mutasi tambah:	
Transfer Masuk	0
Reklasifikasi Masuk	0
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0
Mutasi Kurang:	
Reklasifikasi Keluar	0
Transfer Keluar	(2.604.000.000)
Hibah Keluar	0
Saldo Per 31 Desember 2024	**262.154.346.000,00**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	0,00

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin Rp9.582.828.721,00

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin di Pengadilan Tinggi Semarang per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp9.582.828.721,00 dan Rp9.562.328.721,00.

Peralatan dan mesin periode 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar 0,21 persen dibandingkan tahun 2023. Hal ini disebabkan adanya penambahan anggaran belanja barang maupun belanja modal peralatan dan mesin.

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin serta Akumulasi Penyusutannya per 31 Desember 2024 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan. Rincian mutasi Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 25

Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin periode 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2023	**9.562.328.721,00**
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Hibah Masuk	0
Penggunaan Kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	0
Transfer Masuk	20.500.000,00
Mutasi Kurang:	
Penghentian Aset dari Penggunaan	
Saldo Per 31 Desember 2024	**9.582.828.721,00**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	8.981.158.768,00
Nilai Buku Per 31 Desember 2024	601.669.953,00

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan sebesar Rp15.522.987.792,00

Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp15.522.987.792,00 dan Rp15.821.808.681,00.

Gedung dan Bangunan periode 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar 1,89 persen dibandingkan TA 2023. Hal ini disebabkan oleh adanya penurunan belanja modal.

Rincian Gedung dan Bangunan beserta Akumulasi Penyusutannya per 31 Desember 2024 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Tabel 26

Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan periode 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2023	**15.522.987.792,00**
Mutasi tambah:	
Hibah Masuk	0
Reklasifikasi Masuk	0
Transfer Masuk	0
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	0
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0
Penggunaan Kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	0
Mutasi Kurang:	

Transfer Keluar	(298.820.889,00)
Reklasifikasi keluar	0
Koreksi Pencatatan	0
Saldo Per 31 Desember 2024	**15.821.808.681,00**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	3.968.261.375,00
Nilai Buku Per 31 Desember 2024	**11.853.547.306,00**

C.2.4. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya Rp82.956.742,00

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp82.956.742,00 dan Rp82.956.742,00 dengan rincian sebagai berikut sebagai berikut :

Tabel 27

Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya periode 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2023	**82.956.742,00**
Mutasi kurang:	
Penghentian Aset dari Penggunaan	0
Saldo Per 31 Desember 2024	**82.956.742,00**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	0
Nilai Buku Per 31 Desember 2024	**82.956.742,00**

C.2.5. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (12.949.420.143,00)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar (Rp12.949.420.143,00) dan (Rp11.845.269.545,00)

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024.

Tabel 29

Rincian Akumulasi Penyusunan Aset Tetap

periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

Akumulasi Penyusutan	31 Desember 2024	31 Desember 2023	%
Tanah	262.154.346.000,00	264.758.346.000,00	(0,98)
Peralatan dan Mesin	9.582.828.721,00	9.562.328.721,00	0,21
Gedung dan Bangunan	15.522.987.792,00	15.821.808.681,00	(1,89)
Aset Tetap Lainnya	82.956.742,00	82.956.742,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(12.949.420.143,00)	(11.845.269.545,00)	9,32
Jumlah	**274.393.699.112,00**	**278.380.170.599,00**	**(1,43)**

Akumulasi penyusutan aset tetap periode 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar 9,32 persen dibandingkan TA 2023. Hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan belanja modal peralatan dan mesin, yang mengakibatkan adanya penambahan akumulasi penyusutan.

C.3. Aset Lainnya

Aset Lainnya Rp0,00

Saldo Aset Lainnya Pengaditan Tinggi Semarang per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap. Aset Lainnya pada Pengadilan Tinggi Semarang terdiri dari Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.

Tabel 30

Rincian Aset Lainnya periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

Aset Lainnya	31 Desember 2024	31 Desember 2023	%
Aset tak berwujud	136.200.000,00	136.200.000,00	0
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Ast Lainnya	(136.200.000,00)	(136.200.000,00)	0
Jumlah	**0**	**0**	**NaN**

Aset Tak Berwujud Rp136.200.000,00

C.3.1. Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp136.200.000,00 dan Rp136.200.000,00.

Aset tak berwujud periode 31 Desember 2024 tidak mengalami penurunan maupun kenaikan dibandingkan TA 2023.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Kantor Pengadilan Tinggi Semarang berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor, rincian sebagai berikut :

Tabel 31
Rincian Aset Tak Berwujud 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Nilai
Software Komputer	136.200.000,00
Aset tak berwujud lainnya	0
Jumlah	**136.200.000,00**

Adapun mutasi transaksi Aset Tak Berwujud pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 32
Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud periode 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2023	**136.200.000,00**
Mutasi tambah:	
Pembelian	0,00
Mutasi Kurang :	
Penghentian Aset dari Penggunaan	0
Saldo Per 31 Desember 2024	**136.200.000,00**
Amortisasi s.d. 31 Desember 2024	0,00
Nilai Buku Per 31 Desember 2024	**0,00**

Pada periode 31 Desember 2024 tidak mengalami mutasi tambah, namun hanya mengalami mutasi berkurang yang berasal dari Penghentian aset dari penggunaan *software* tersebut, karena sudah tidak digunakan lagi dan masa manfaatnya sudah habis.

Akumulasi Penyusutan

C.3.1. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya.

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31

(Rp136.200.000,00)

Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar (Rp136.200.000,00) dan (Rp136.200.000,00). Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut :

Tabel 34

Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset Lainnya periode 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan	Nilai Buku
A.	Aset Tak Berwujud			
	Software	136.200.000,00	(136.200.000,00)	0,00
B.	Aset Lain-lain,			
1	Aset tak berwujud yang tidak digunakan dalam operasional	0,00	0,00	0,00
2	Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan	0,00	0,00	0,00
Total		**136.200.000,00**	**(136.200.000,00)**	**0,00**

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

C.4. Kewajiban

Kewajiban Jangka Pendek Rp9.530.569,00

Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Kewajiban Jangka Pendek Kantor Wilayah Pengadilan Tinggi Semarang per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp9.530.569,00 dan Rp77.280.463,00.

Tabel 35

Rincian Kewajiban Jangka Pendek perode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

Uraian Kewajiban	31 Desember 2024	31 Desember 2023	%
Utang kepada Pihak Ketiga	3.800.846,00	62.993.741,00	(93,97)
Pendapatan diterima dimuka	5.729.723,00	14.286.722,00	(59,89)
Jumlah	**9.530.569,00**	**77.280.463,00**	**(87,67)**

Kewajiban Jangka Pendek periode 31 Desember 2024 mengalami penurunan yang signifikan sebesar 87,67 persen dibandingkan TA 2023. Hal ini disebabkan beberapa faktor seperti :

1. Adanya penurunan utang kepada pihak ketiga yang terlaksana sampai dengan periode 31 Desember 2024.
2. Adanya penurunan pendapatan diterima dimuka, berupa sewa barang milik negara (BMN) kepada pihak ketiga, dimana periode sewa melebihi dari tahun anggaran pelaporan.

Utang Kepada Pihak Ketiga Rp3.800.846,00

C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp3.800.846,00 dan Rp62.993.741,00.

Tabel 36

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga

periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

Uraian Kewajiban	31 Desember 2024	31 Desember 2023	%
Belanja Pegawai yang masih harus dibayar	0,00	0,00	0,00)
Belanja Barang yang masih harus dibayar	3.800.846,00	62.993.741,00	(93,97)
Utang kepada pihak ketiga lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah	**3.800.846,00**	**62.993.741,00**	**(93,97)**

Utang kepada pihak ketiga periode 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar 93,97 persen. Hal ini disebabkan adanya belanja barang yang masih harus dibayar.

C.4.2. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka Rp5.729.723,00

Pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp5.729.723,00 dan Rp14.286.722,00.

Pendapatan diterima dimuka merupakan pendapatan yang sudah disetorkan ke kas negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBP.

Rincian pendapatan diterima dimuka dari pihak ketiga disajikan sebagai berikut :

C.5. Ekuitas

Ekuitas Rp274.534.150.943,00

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp274.534.150.943,00 dan Rp278.348.051.136,00.

Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Tabel 38

Perbandingan Ekuitas periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	%
Ekuitas	274.534.150.943,00	278.348.051.136,00	(1,37)
Jumlah	**274.534.150.943,00**	**278.348.051.136,00**	**(1,37)**

Ekuitas periode 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar (1,37) persen dibandingkan TA 2023. Hal ini disebabkan adanya kewajiban jangka pendek berupa utang kepada pihak ketiga yang mengalami penurunan.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak

Pendapatan Negara Bukan Pajak Rp30.831.291,00

Jumlah pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 30.831.291,00 dan Rp 27.143.635,00.

Pendapatan tersebut terdiri dari :

Tabel 39

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

AKUN	SATUAN KERJA	31 Desember 2024	31 Desember 2023	%
425131	Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan	30.831.291,00	27.143.635,00	13,586
425131	Pengembalian pendapatan sewa tanah, gedung, dan bangunan	0,00	0,00	0
425811	Pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah	0,00	0,00	0
425999	Pendapatan Anggaran lain-lain	0,00	0,00	0
JUMLAH		**30.831.291,00**	**27.143.635,00**	**13,586**

Pendapatan akrual pada Satker lingkungan Pengadilan Tinggi Semarang berasal dari Pendapatan Sewa, Gedung dan Bangunan berupa Sewa Kantin, Sewa Mesin ATM dan Sewa Rumah Negara Berpenghuni untuk Pejabat di Satuan Kerja Korwil Jawa Tengah periode 31 Desember 2024.

Pendapatan Negara Bukan Pajak periode 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar 13,586 persen dibandingkan dengan 31 Desember 2023. Hal ini disebabkan beberapa faktor berikut :

1. Terdapat pejabat yang mutasi masuk Pengadilan Tinggi Semarang, sehingga pendapatan sewa rumah negara bertambah, karena pendapatan sewa rumah negara berasal dari Potongan Gaji Pejabat dimaksud.
2. Terdapat Sewa Mesin ATM dan Kantin yang melakukan penyetoran sewa pada tahun 2024 yang menyebabkan adanya penambahan pendapatan sewa dari non rumah negara.

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada periode 31 Desember 2024 dan 31

Beban Pegawai Rp41.580.057.876,00

Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp41.580.057.876,00 dan Rp34.573.773.829,00.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang diperkerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Tabel 40

Rincian Beban Pegawai periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

Akun	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	%
511111	Beban Gaji Pokok PNS	9.415.309.800,00	8.183.872.800,00	15,05
511111	Pengembalian Beban Gaji Pokok PNS	(3.245,00)	0,00	-
511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	118.079,00	91.870,00	28,53
511119	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	0,00	(498,00)	(100,00)
511121	Pengembalian Beban Tunj. Suami/Istri PNS	0,00	(2.502.280,00)	(100,00)
511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	665.715.882,00	573.808.160,00	16,02
511122	Pengembalian Beban Tunj. Anak PNS	0,00	(2.502.280,00)	(100,00)
511122	Beban Tunj. Anak PNS	67.601.442,00	67.204.874,00	0,59
511123	Pengembalian Beban Tunj. Struktural PNS	0,00	(1.260.000,00)	(100,00)
511123	Beban Tunj. Struktural PNS	111.020.000,00	109.220.000,00	1,65
511124	Pengembalian Beban Tunj. Fungsional PNS	(34.560.000,00)	(1.180.000,00)	2.828,81
511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	23.712.432.000,00	(19.127.408.000,00)	(223,97)
511125	Beban Tunj. PPh PNS	4.811.647.793,00	(3.667.572.302,00)	(231,19)
511125	Pengembalian Beban Tunj. PPh PNS	0,00	0,00	-
511126	Pengembalian Beban Tunj. Beras PNS	0,00	(291.500,00)	(100,00)
511126	Beban Tunj. Beras PNS	281.786.220,00	(269.692.080,00)	(204,48)
511129	Beban Uang Makan PNS	1.139.009.000,00	1.060.990.000,00	7,35
511129	Pengembalian Beban Uang Makan PNS	0,00	0,00	-
511151	Beban Tunjangan Umum PNS	65.905.000,00	72.725.000,00	(9,38)
511151	Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	(185.000,00)	(740.000,00)	(75,00)
511158	Beban Tunjangan Hakim Ad Hoc	1.158.150.000,00	1.434.200.000,00	(19,25)
511611	Beban Gaji Pokok PPPK	134.551.200,00	8.899.500,00	1.411,90
511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	2.145,00	191,00	1.023,04

511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	4.485.040,00	296.650,00	1.411,90
511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	0,00	0,00	0,00
511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	21.742.000,00	1.553.000,00	1.300,00
511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	4.055.520,00	289.680,00	1.300,00
511628	Beban Uang Makan PPPK	21.275.000,00	1.924.000,00	1.005,77
JUMLAH		**41.580.057.876,00**	**34.573.773.829,00**	**20,26**

Beban pegawai periode 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar 20,26 persen dibandingkan 31 Desember 2023. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

1. Terdapat pegawai mutasi masuk Pengadilan Tinggi Semarang, menyebabkan kenaikan pembayaran gaji pegawai.
2. Terdapat pengembalian beban gaji pokok PNS dan instrumen lainnya yang menginduk ke Gaji Pokok PNS, karena adanya kesalahan perhitungan kenaikan pangkat atau jabatan, sehingga menyebabkan pegawai dimaksud harus mengembalikan gaji yang sudah dibayarkan.

D.3. Beban Persediaan

Beban Persediaan Rp98.833.500,00

Jumlah Beban Persediaan pada periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp98.833.500,00 dan Rp166.104.652,00.

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Rincian beban persediaan periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 41

Rincian Beban Persediaan per satuan kerja korwil Jawa Tengah

Periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	%
Barang Konsumsi	98.833.500,00	166.104.652,00	(40,499)
Jumlah	**98.833.500,00**	**166.104.652,00**	**(40,499)**

Beban persediaan periode 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar 40,499 persen dibandingkan periode 31 Desember 2023. Hal ini disebabkan adanya penurunan belanja barang konsumsi, karena adanya pengurangan anggaran belanja persediaan.

Beban Barang dan Jasa Rp4.643.123.772,00

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp4.643.123.772,00 dan Rp4.677.093.556,00.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Rincian beban barang dan jasa untuk periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 42

Rincian Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

Akun	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	%
521111	Beban Keperluan Perkantoran	724.929.750,00	702.595.119,00	3,18
521111	Pengembalian Beban Keperluan Perkantoran	0	(8.730,00)	(100)
521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	29.948.785,00	39.572.500,00	(24,32)
521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	89.744.000,00	121.236.000,00	(25,98)
521119	Beban Barang Operasional Lainnya	101.700.110,00	80.962.500,00	25,61
521119	Pengembalian Beban Barang Operasional Lainnya	0	(969.000,00)	(100)
521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	8.720.200,00	30.362.600,00	(71,28)
521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	0	21.736.000,00	(100)
522111	Beban Langganan Listrik	714.900,00	2.340.710,00	(69,46)

522112	Beban Langganan Telepon	8.234.346,00	8.518.579,00	(3,34)
522113	Beban Langganan Air	37.438.900,00	38.887.700,00	(3,73)
522141	Beban Sewa	3.649.202.781,00	3.611.959.578,00	(1,03)
522141	Pengembalian Beban Sewa	(13.010.000,00)	0	-
522151	Beban Jasa Profesi	0	1.500.000,00	100
522191	Beban Jasa Lainnya	5.500.000	18.400.000,00	70,11
JUMLAH		**4.643.123.772,00**	**4.677.093.556,00**	**0,73**

Beban barang dan jasa periode 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar 11,63 persen dibandingkan periode 31 Desember 2023. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. Pada periode 31 Desember 2024 anggaran penanggulangan dan penanganan pandemi Covid 19 direvisi kebelanja yang lainnya.
2. Terdapat beban langganan listrik, beban sewa rumah dinas hakim, dan beban jasa lainnya mengalami penurunan yang cukup signifikan seiring dengan adanya aktifitas pelayanan di satuan kerja korwil Jawa Tengah.

Walaupun secara total beban barang dan jasa mengalami kenaikan tetapi ada beberapa pos beban operasional perkantoran seperti pengiriman surat mengalami penurunan karena sudah disampaikan secara online.

Beban Pemeliharaan sebesar Rp1.508.348.967,00

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.508.348.967,00 dan Rp1.463.941.042,00.

Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Rincian beban pemeliharaan untuk periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 43

Rincian Beban Pemeliharaan

periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

Akun	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	%
523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	853.721.949,00	801.790.500,00	6,48
523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	74.881.083,00	74.825.000,00	0,07
523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	565.915.935,00	537.910.042,00	5,21
593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	13.830.000,00	49.415.500,	(72,01)
JUMLAH		**1.508.348.967,00**	**1.463.941.042,00**	**3,03**

Beban pemeliharaan periode 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar 3,03 persen dibandingkan dengan periode 31 Desember 2023. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor sebagai berikut :

1. Terdapat kenaikan beban pemeliharaan gedung dan bangunan karena adanya pemeliharaan rutin gedung dan bangunan kantor pada satuan kerja. Serta adanya peningkatan rumah negara tidak berpenghuni sehingga dapat dilakukan renovasi secara berkala menggunakan anggaran dipa.
2. Terdapat beban pemeliharaan peralatan dan mesin yang mengalami kenaikan karena adanya penambahan fasilitas kantor guna mendukung aktivitas sehari-hari.
3. Terdapat beban aset ekstrakomptabel Gedung dan Bangunan yang mengalami kenaikan, disebabkan karena adanya belanja barang gedung dan bangunan ekstrakomptabel. Anggaran belanja tersebut merupakan pengalihan anggaran untuk penanganan dan penanggulangan pandemi Covid 19.

Kenaikan beban pemeliharaan karena adanya pengeluaran untuk mempertahankan performa dan kapasitas atas aset-aset lama serta

pengeluaran untuk asuransi atas gedung dan bangunan.

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Rp5.264.169.436,00

Beban Perjalanan Dinas periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp5.264.169.436,00 dan Rp5.812.585.152,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Penurunan beban perjalanan dinas disebabkan oleh menurunnya frekuensi perjalanan dinas pegawai untuk menghadiri kegiatan rapat koordinasi atau pelatihan yang diselenggarakan Mahkamah Agung dimana perjalanan dinasnya ditanggung sendiri oleh masing-masing satuan kerja. Rincian beban perjalanan dinas untuk periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 44

Rincian Beban Perjalanan Dinas

periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

Akun	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	%
524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	404.188.261,00	386.156.877,00	4,67
524111	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Biasa	(600.000,00)	(-342.000,00)	-
524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.050.000,00	4.950.000,00	(18,18)
524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	78.000.000,00	76.720.000,00	1,67
524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	92.850.000,00	(100)
JUMLAH		**485.638.261,00**	**560.334.877,00**	**(13,33)**

Beban perjalanan dinas periode 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar 13,33 persen dibandingkan periode 31 Desember 2023. Hal ini disebabkan sebagai berikut :

1. Beban perjalanan dinas biasa mengalami penurunan, karena adanya penurunan perjalanan dinas biasa yakni berupa perjalanan dinas untuk melakukan konsultasi dan koordinasi dari satuan kerja ke tingkat banding maupun ke instansi lain.
2. Adanya penurunan beban perjalanan dinas paket meeting luar

kota,

3. Pengembalian beban perjalanan dinas paket meeting luar kota mengalami penurunan, dikarenakan tidak adanya undangan pelatihan diluar daerah satuan kerja, dimana undangan untuk menghadiri acara tersebut menggunakan fullboard.

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar (Rp42.849.583.075,00) dan Rp42.000.027.389,00.

Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar (Rp42.849.583.075,00)

Beban penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets)* selama masa manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud. Sedangkan untuk amortisasi adalah alokasi harga perolehan aset tetap tak berwujud secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya, yang hanya dapat diterapkan atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 45

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

Akun	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	%
591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	18.535.011.285,00	18.529.018.274,00	(0,03)
591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	24.281.521.674,00	23.433.512.497,00	3,61
592115	Beban Amortisasi Software	4.525.000,00	8.587.500,00	(47,30)
592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak	28.525.116,00	26.479.430,00	7,72
JUMLAH		**42.849.583.075,00**	**41.997.597.701,00**	**2,02**

Beban Penyusutan dan Amortisasi periode 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar 2,02 persen dibandingkan 31

Desember 2023. Hal ini disebabkan oleh :

1. Adanya penambahan peralatan dan mesin sebagai fasilitas penunjang kegiatan sehari-hari.
2. Adanya penambahan transaksi BMN seperti koreksi pencatatan, transaksi penghapusan, transaksi revaluasi untuk peralatan dan mesin maupun gedung dan bangunan yang menyebabkan adanya penambahan penyusutan transaksional pada masing-masing penyusutan.

Kegiatan Non Operasional sebesar Rp257.751.552,00

D.8. Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari kegiatan non operasional periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp257.751.552,00 dan Rp(6.298.111.344,00) sebagai berikut :

Tabel 46
Rincian Kegiatan Non Operasional
periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	%
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	390.482.439,00	296.693.655,00	31,61
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	156.088.867,00	7.472.864.278,00	(97,91)
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	234.393.572,00	(7.176.170.623,00)	(103,27)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	23.357.980,00	879.047.253,00	(97,34)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00	987.974,00	(100,00)
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	23.357.980,00	878.059.279,00	(97,34)
Jumlah Beban	**257.751.552,00**	**(6.298.111.344,00)**	**(104,09)**

Pos Luar Biasa Nihil

Kegiatan Non Operasional periode 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar 104,09 persen dibandingkan periode 31 Desember 2023. Hal ini disebabkan adanya penurunan beban pelepasan aset non lancar yakni penghapusan BMN serta adanya peningkatan pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya pada satuan kerja.

D.9. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat pendapatan atau beban dari Pos Luar Biasa untuk periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal Rp2.625.722.439.832,00

Nilai Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 dan 1 Januari 2022 masing-masing adalah sebesar Rp2.625.722.439.832,00 dan Rp2.620.383.901.491,00.

E.2. Surplus/Defisit-LO

Defisit-LO (Rp572.742.763.904,00)

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah defisit sebesar (Rp572.742.763.904,00) dan (Rp582.703.798.468,00).

Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Koreksi yang Manambah Ekuitas (Rp2.410.964.247,00)

Koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar (Rp2.410.964.247,00) dan Rp4.949.553.349,00.

E.4.1. Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset Nihil

Jumlah Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar *Nihil* dan *Nihil*.

Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan harga perolehan terakhir.

E.4.2. Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi atas reklasifikasi Rp3.287.000,00

Koreksi atas Reklasifikasi merupakan transaksi pencatatan /penghapusan BMN yang sebelumnya dicatat dengan klasifikasi BMN lain/sebelum dicatat kembali ke dalam klasifikasi BMN yang baru.

Koreksi atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp3.287.000,00 dan (Rp2.800.000).

Tabel 47

Rincian Koreksi Atas Reklasifikasi periode 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Peralatan dan Mesin	3.287.000
Gedung dan Bangunan	0
Jumlah	**3.287.000**

Hal ini disebabkan karena kesalahan rincian barang dalam membuat BAST di modul komitmen, operator salah memasukkan jenis rincian barang menjadi persediaan, padahal seharusnya memilih asset kemudian satuan kerja melakukan reklasifikasi aset.

Satuan kerja sudah melakukan tindak lanjut dengan melakukan reklas dari Persediaan ke Aset, kemudian dari Modul Aset satuan kerja melakukan reklas masuk.

Keadaan ini menyebabkan adanya ketidaksesuaian antara kode akun vs kode persediaan di dalam monsakti.

E.4.3. Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset Nihil

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar *Nihil* dan *Nihil*. Selisih Revaluasi Aset Tetap tersebut berasal dari penilaian ulang atas tanah di Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Semarang.

E.4.4. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi sebesar (Rp2.401.996.215,00)

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar (Rp2.401.996.215,00) dan Rp4.952.472.914,00.

Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi adalah sebagai berikut :

Tabel 48

Perbandingan Koreksi Aset Non Revaluasi

periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

URAIAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023	%
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(2.401.996.215,00)	4.962.472.914,00	(148,40)
Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)
JUMLAH	**(2.401.996.215,00)**	**4.952.472.914,00**	**(148,50)**

Koreksi aset non revaluasi periode 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar 148,50 persen dibandingkan periode 31 Desember 2023. Hal ini disebabkan karena adanya transaksi BMN berupa reklasifikasi keluar, koreksi pencatatan, dan penghapusan yang terjadi di wilayah Jawa Tengah.

E.4.5. Lain-Lain

Lain-lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember

(Rp12.255.032,00)

2024 dan 31 Desember 2023 masing – masing adalah sebesar *(Rp12.255.032,00)* dan *(Rp119.565)*.

Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang, dan utang.

E.5. Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas Rp594.430.045.075,00

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp594.430.045.075,00 dan Rp593.092.783.460,00.

Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal K/L, antar K/L, antar BUN, maupun K/L dengan BUN.

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

Tabel 49

Transaksi Antar Entitas periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

Akun	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	%
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	584.430.674.448,00	558.435.452.568,00	4,66
313121	Diterima dari Entitas Lain	(892.795.527,00)	(1.346.269.688,00)	(33,68)
313221	Transfer Masuk	5.498.729.000,00	23.287.477.419,00	(76,39)
391131	Pengesahan Hibah Langsung	3.331.258.444,00	5.231.087.149,00	(36,32)
391133	Pengesahan Hibah Langsung Tahun Anggaran Yang Lalu	2.062.178.710,00	1.292.181.467,00	59,59
JUMLAH		**594.430.045.075,00**	**586.899.928.915,00**	**1,28**

Transaksi antar entitas periode 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar 1,28 persen dibandingkan periode 31 Desember 2023. Hal ini disebabkan adanya penurunan yang sangat signifikan pada transaksi BMN transfer masuk.

E.5.1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Laon merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN)

Pada periode hingga 31 Desember 2024, DDEL sebesar (Rp892.795.527,00) sedangkan DKEL sebesar Rp584.430.674.448,00.

E.5.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L, dan antara K/L dengan BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp5.498.729.000,00.

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar *Nihil*.

E.5.3. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung K/L dalam bentuk kas, barang, maupun jasa, sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp3.331.258.444,00 yang diterima sepanjang tahun 2023. Semua Hibah TA 2022 sebagian yang belum ada pengesahan hibahnya, sedang dalam proses pengajuan memo pengesahan hibah ke KPPN.

Periode 31 Desember 2024 terdapat pengesahan hibah langsung tahun yang lalu sebesar Rp2,062,178,710.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan pengembalian hibah langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 adalah Rp0.

E.6. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir Rp2.644.998.756.756,00

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp2.644.998.756.756,00 dan Rp2.625.722.439.832,00.

➢

DATA DUKUNG

LAPORAN KEUANGAN TA 2024 *(AUDITED)*

UAKPA 097713

PENGADILAN TINGGI SEMARANG

NERACA

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH

SATUAN KERJA : (097713) PENGADILAN TINGGI SEMARANG

Tgl Data : 08/05/25 2:14 PM

Tgl Cetak : 08/05/25 10:35 PM

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Persediaan	149,982,400	45,161,000	104,821,400	232.11
JUMLAH ASET LANCAR	**149,982,400**	**45,161,000**	**104,821,400**	**232.11**
ASET TETAP				
Tanah	262,154,346,000	264,758,346,000	(2,604,000,000)	(0.98)
Peralatan dan Mesin	9,582,828,721	9,562,328,721	20,500,000	0.21
Gedung dan Bangunan	15,522,987,792	15,821,808,681	(298,820,889)	(1.89)
Aset Tetap Lainnya	82,956,742	82,956,742	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(12,949,420,143)	(11,845,269,545)	(1,104,150,598)	9.32
JUMLAH ASET TETAP	**274,393,699,112**	**278,380,170,599**	**(3,986,471,487)**	**(1.43)**
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	136,200,000	136,200,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(136,200,000)	(136,200,000)	0	0.00
JUMLAH ASET LAINNYA	**0**	**0**	**0**	
JUMLAH ASET	**274,543,681,512**	**278,425,331,599**	**(3,881,650,087)**	**(1.39)**
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	3,800,846	62,993,741	(59,192,895)	(93.97)
Pendapatan Diterima Dimuka	5,729,723	14,286,722	(8,556,999)	(59.89)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**9,530,569**	**77,280,463**	**(67,749,894)**	**(87.67)**
JUMLAH KEWAJIBAN	**9,530,569**	**77,280,463**	**(67,749,894)**	**(87.67)**
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	274,534,150,943	278,348,051,136	(3,813,900,193)	(1.37)
JUMLAH EKUITAS	**274,534,150,943**	**278,348,051,136**	**(3,813,900,193)**	**(1.37)**
JUMLAH EKUITAS	**274,534,150,943**	**278,348,051,136**	**(3,813,900,193)**	**(1.37)**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**274,543,681,512**	**278,425,331,599**	**(3,881,650,087)**	**(1.39)**

Keterangan :

FINAL

Semarang, 8 Mei 2025

Penanggung Jawab UAKPA

Sekretaris

DRS. MUHAMAD ASHAR, M.H.

NIP 196801141995031002

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : **(005) MAHKAMAH AGUNG**

ESELON I : **(01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI**

WILAYAH/PROVINSI : **(0300) JAWA TENGAH**

SATUAN KERJA : **(097713) PENGADILAN TINGGI SEMARANG**

Tgl Data : 08/05/25 2:14 PM

Tgl Cetak : 08/05/25 10:34 PM

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	30,831,291	27,143,635	3,687,656	13.586
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	30,831,291	27,143,635	3,687,656	13.586
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	30,831,291	27,143,635	3,687,656	13.586
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	41,580,057,876	34,573,773,829	7,006,284,047	20.265
Beban Persediaan	98,833,500	166,104,652	(67,271,152)	(40.499)
Beban Barang dan Jasa	4,643,123,772	4,677,093,556	(33,969,784)	(0.726)
Beban Pemeliharaan	1,508,348,967	1,463,941,042	44,407,925	3.033
Beban Perjalanan Dinas	485,638,261	560,334,877	(74,696,616)	(13.331)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : **(005) MAHKAMAH AGUNG**

ESELON I : **(01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI**

WILAYAH/PROVINSI : **(0300) JAWA TENGAH**

SATUAN KERJA : **(097713) PENGADILAN TINGGI SEMARANG**

Tgl Data : 08/05/25 2:14 PM

Tgl Cetak : 08/05/25 10:34 PM

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1,251,273,678	1,311,822,622	(60,548,944)	(4.616)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	49,567,276,054	42,753,070,578	6,814,205,476	15.939
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(49,536,444,763)	(42,725,926,943)	(6,810,517,820)	15.94
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	2,454,270	3,388,140	(933,870)	(27.563)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	2,454,270	3,388,140	(933,870)	(27.563)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	2,454,270	3,388,140	(933,870)	(27.563)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(49,533,990,493)	(42,722,538,803)	(6,811,451,690)	15.943
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(49,533,990,493)	(42,722,538,803)	(6,811,451,690)	15.943

Keterangan :

FINAL

Semarang, 8 Mei 2025

Penanggung Jawab UAKPA

Sekretaris

DRS. MUHAMAD ASHAR, M.H.

NIP 196801141995031002

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : BADAN URUSAN ADMINISTRASI 01
SATUAN KERJA : PENGADILAN TINGGI SEMARANG 097713

Tgl Data : 08/05/25 2:14 PM
Tgl Cetak : 08/05/25 10:35 PM

lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Pendapatan Perpajakan	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	**45,466,000**	**24,728,562**	**(20,737,438)**	**54.39**	**29,318,000**	**21,087,692**	**(8,230,308)**	**71.93**
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	45,466,000	24,728,562	(20,737,438)	54.39	29,318,000	21,087,692	(8,230,308)	71.93
III. Pendapatan Hibah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	**45,466,000**	**24,728,562**	**(20,737,438)**	**54.39**	**29,318,000**	**21,087,692**	**(8,230,308)**	**71.93**
B. Belanja Negara	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belanja Pemerintah Pusat	48,974,451,000	48,679,150,782	(295,300,218)	99.40	42,426,504,000	41,930,443,449	(496,060,551)	98.83
1. Belanja Pegawai	41,823,736,000	41,638,801,326	(184,934,674)	99.56	34,941,699,000	34,520,466,379	(421,232,621)	98.79
2. Belanja Barang	6,951,070,000	6,841,215,345	(109,854,655)	98.42	6,913,225,000	6,839,704,409	(73,520,591)	98.94
3. Belanja Modal	199,645,000	199,134,111	(510,889)	99.74	571,580,000	570,272,661	(1,307,339)	99.77
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005

ESELON I : BADAN URUSAN ADMINISTRASI 01

SATUAN KERJA : PENGADILAN TINGGI SEMARANG 097713

Tgl Data : 08/05/25 2:14 PM
Tgl Cetak : 08/05/25 10:35 PM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	**48,974,451,000**	**48,679,150,782**	**(295,300,218)**	**99.40**	**42,426,504,000**	**41,930,443,449**	**(496,060,551)**	**98.83**
C. PEMBIAYAAN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Keterangan :
FINAL

Semarang, 8 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPA
Sekretaris

DRS. MUHAMAD ASHAR, M.H.
NIP 196801141995031002

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH

SATUAN KERJA : (097713) PENGADILAN TINGGI SEMARANG

Tgl Data : 08/05/25 6:24 PM

Tgl Cetak : 08/05/25 10:34 PM

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	278,348,051,136	277,628,860,657	719,190,479	0.26
SURPLUS/DEFISIT-LO	(49,533,990,493)	(42,722,538,803)	(6,811,451,690)	15.94
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	1,515,004,775	(1,515,004,775)	(100)
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	1,515,004,775	(1,515,004,775)	(100)
LAIN-LAIN	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	45,720,090,300	41,926,724,507	3,793,365,793	9.05
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(3,813,900,193)	719,190,479	(4,533,090,672)	(630.3)
EKUITAS AKHIR	274,534,150,943	278,348,051,136	(3,813,900,193)	(1.37)

Keterangan :

FINAL

Semarang, 8 Mei 2025

Penanggung Jawab UAKPA

Sekretaris

DRS. MUHAMAD ASHAR, M.H.

NIP 196801141995031002

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH

SATUAN KERJA : (097713) PENGADILAN TINGGI SEMARANG

Tgl Data : 08/05/25 6:24 PM

Tgl Cetak : 08/05/25 10:35 PM

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	48,679,150,782
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	24,728,562	0
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	22,274,292
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	2,454,270
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	9,421,211,000	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	118,159	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	665,715,882	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	67,601,442	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	111,020,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	23,745,732,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	4,817,422,543	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	281,858,640	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	1,152,704,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	65,905,000	0
3.0	511158	Belanja Tunjangan Hakim Ad Hoc	1,158,150,000	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	134,551,200	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2,145	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	4,485,040	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	21,742,000	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	4,055,520	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	21,275,000	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	725,163,625	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	29,948,785	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	89,744,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	101,700,110	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	8,720,200	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	217,484,900	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	714,900	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	8,232,416	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	37,656,400	0
3.0	522141	Belanja Sewa	3,649,202,781	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	5,500,000	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	853,721,949	0
3.0	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	74,881,083	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	565,915,935	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	404,188,261	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,050,000	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	78,000,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH

SATUAN KERJA : (097713) PENGADILAN TINGGI SEMARANG

Tgl Data : 08/05/25 6:24 PM

Tgl Cetak : 08/05/25 10:35 PM

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	199,134,111	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	3,245
3.1	511124	Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	34,560,000
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	185,000
3.1	522141	Pengembalian Belanja Sewa	0	13,010,000
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	600,000
JUMLAH			**48,752,237,589**	**48,752,237,589**

Keterangan :

FINAL

Semarang, 8 Mei 2025

Penanggung Jawab UAKPA

Sekretaris

DRS. MUHAMAD ASHAR, M.H.

196801141995031002

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH

SATUAN KERJA : (097713) PENGADILAN TINGGI SEMARANG

Tgl Data : 08/05/25 2:14 PM

Tgl Cetak : 08/05/25 10:35 PM

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	113,120,400	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	36,862,000	0
0.0	131111	Tanah	262,154,346,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	9,582,828,721	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	15,522,987,792	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	82,956,742	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	8,981,158,768
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	3,968,261,375
0.0	162151	Software	136,200,000	0
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	136,200,000
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	3,800,846
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima di Muka	0	5,729,723
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	48,679,150,782
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	24,728,562	0
0.0	313211	Transfer Keluar	2,954,831,920	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	20,500,000
0.0	391111	Ekuitas	0	278,348,051,136
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	30,831,291
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	2,454,270
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	9,415,309,800	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	114,834	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	665,715,882	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	67,601,442	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	111,020,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	23,677,872,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	4,811,647,793	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	281,786,220	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	1,139,009,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	65,720,000	0
3.0	511158	Beban Tunjangan Hakim Ad Hoc	1,158,150,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	134,551,200	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	2,145	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	4,485,040	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	21,742,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	4,055,520	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	21,275,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	724,929,750	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	29,948,785	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH

SATUAN KERJA : (097713) PENGADILAN TINGGI SEMARANG

Tgl Data : 08/05/25 2:14 PM

Tgl Cetak : 08/05/25 10:35 PM

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	89,744,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	101,700,110	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	8,720,200	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	714,900	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	8,234,346	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	37,438,900	0
3.0	522141	Beban Sewa	3,636,192,781	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	5,500,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	853,721,949	0
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	74,881,083	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	565,915,935	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	403,588,261	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,050,000	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	78,000,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	380,397,574	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	870,876,104	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	98,833,500	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	13,830,000	0
JUMLAH			**340,176,138,191**	**340,176,138,191**

Keterangan :

FINAL

Semarang, 8 Mei 2025

Penanggung Jawab UAKPA

Sekretaris

DRS. MUHAMAD ASHAR, M.H.

NIP 196801141995031002

NERACA PERCOBAAN

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 1 JANUARI 2024 (SALDO AWAL)

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 **MAHKAMAH AGUNG**

UNIT ORGANISASI : 01 **BADAN URUSAN ADMINISTRASI**

WILAYAH/PROVINSI : 0300 **JAWA TENGAH**

SATUAN KERJA : 097713 **PENGADILAN TINGGI SEMARANG**

Tgl. Cetak 08/05/2025 10:38 PM

lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	42,476,000	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	2,685,000	0
0.0	131111	Tanah	264,758,346,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	9,562,328,721	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	15,821,808,681	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	82,956,742	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	8,600,761,194
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	3,244,508,351
0.0	162151	Software	136,200,000	0
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	136,200,000
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	58,743,450
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	4,250,291
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima di Muka	0	14,286,722
0.0	391111	Ekuitas	0	278,348,051,136
JUMLAH			**290,406,801,144**	**290,406,801,144**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 005**	**MAHKAMAH AGUNG**
ESELON I	**: 01**	**BADAN URUSAN ADMINISTRASI**
WILAYAH/PROVINSI	**: 0300**	**JAWA TENGAH**
SATUAN KERJA	**: 097713**	**PENGADILAN TINGGI SEMARANG**
JENIS SATUAN KERJA	**: KD**	

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 08/05/25 10:38 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 8/5/25 10:30 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	9,018,883,000	9,430,984,000	9,421,211,000	0	9,421,211,000	99.9	9,773,000
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	93,000	120,000	118,159	3,245	114,914	95.76	5,086
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	587,149,000	675,718,000	665,715,882	0	665,715,882	98.52	10,002,118
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	78,019,000	70,602,000	67,601,442	0	67,601,442	95.75	3,000,558
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	113,561,000	111,020,000	111,020,000	0	111,020,000	100	0
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	18,825,761,000	23,815,281,000	23,745,732,000	34,560,000	23,711,172,000	99.56	104,109,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	3,476,905,000	4,827,999,000	4,817,422,543	0	4,817,422,543	99.78	10,576,457
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	278,723,000	285,000,000	281,858,640	0	281,858,640	98.9	3,141,360
511129	Belanja Uang Makan PNS	1,435,368,000	1,184,479,000	1,152,704,000	0	1,152,704,000	97.32	31,775,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	123,476,000	67,335,000	65,905,000	185,000	65,720,000	97.6	1,615,000
511158	Belanja Tunjangan Hakim Ad Hoc	1,833,701,000	1,164,500,000	1,158,150,000	0	1,158,150,000	99.45	6,350,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	35,771,639,000	41,633,038,000	41,487,438,666	34,748,245	41,452,690,421	99.57	180,347,579
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	0	134,552,000	134,551,200	0	134,551,200	100	800
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0	4,000	2,145	0	2,145	53.62	1,855
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	0	4,491,000	4,485,040	0	4,485,040	99.87	5,960
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	0	502,000	0	0	0	0	502,000
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	0	21,742,000	21,742,000	0	21,742,000	100	0
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	0	4,056,000	4,055,520	0	4,055,520	99.99	480
511628	Belanja Uang Makan PPPK	0	25,351,000	21,275,000	0	21,275,000	83.92	4,076,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	0	190,698,000	186,110,905	0	186,110,905	97.59	4,587,095
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	35,771,639,000	41,823,736,000	41,673,549,571	34,748,245	41,638,801,326	99.56	184,934,674
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	710,221,000	742,344,000	725,163,625	0	725,163,625	97.69	17,180,375
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	30,000,000	30,000,000	29,948,785	0	29,948,785	99.83	51,215
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	88,176,000	92,880,000	89,744,000	0	89,744,000	96.62	3,136,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	101,969,000	106,365,000	101,700,110	0	101,700,110	95.61	4,664,890
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	930,366,000	971,589,000	946,556,520	0	946,556,520	97.42	25,032,480
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	9,000,000	8,720,200	0	8,720,200	96.89	279,800
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	0	9,000,000	8,720,200	0	8,720,200	96.89	279,800

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 005**	**MAHKAMAH AGUNG**
ESELON I	**: 01**	**BADAN URUSAN ADMINISTRASI**
WILAYAH/PROVINSI	**: 0300**	**JAWA TENGAH**
SATUAN KERJA	**: 097713**	**PENGADILAN TINGGI SEMARANG**
JENIS SATUAN KERJA	**: KD**	

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 08/05/25 10:38 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 8/5/25 10:30 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	136,720,000	217,550,000	217,484,900	0	217,484,900	99.97	65,100
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	136,720,000	217,550,000	217,484,900	0	217,484,900	99.97	65,100
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	3,000,000	3,000,000	714,900	0	714,900	23.83	2,285,100
522112	Belanja Langganan Telepon	12,000,000	12,000,000	8,232,416	0	8,232,416	68.6	3,767,584
522113	Belanja Langganan Air	48,000,000	39,600,000	37,656,400	0	37,656,400	95.09	1,943,600
522141	Belanja Sewa	3,662,680,000	3,670,266,000	3,649,202,781	13,010,000	3,636,192,781	99.07	34,073,219
522191	Belanja Jasa Lainnya	4,000,000	5,500,000	5,500,000	0	5,500,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	3,729,680,000	3,730,366,000	3,701,306,497	13,010,000	3,688,296,497	98.87	42,069,503
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	689,559,000	853,860,000	853,721,949	0	853,721,949	99.98	138,051
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	74,981,000	74,981,000	74,881,083	0	74,881,083	99.87	99,917
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	643,179,000	568,263,000	565,915,935	0	565,915,935	99.59	2,347,065
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	1,407,719,000	1,497,104,000	1,494,518,967	0	1,494,518,967	99.83	2,585,033
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	540,475,000	436,511,000	404,188,261	600,000	403,588,261	92.46	32,922,739
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8,550,000	10,950,000	4,050,000	0	4,050,000	36.99	6,900,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	78,000,000	78,000,000	0	78,000,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	549,025,000	525,461,000	486,238,261	600,000	485,638,261	92.42	39,822,739
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	6,753,510,000	6,951,070,000	6,854,825,345	13,610,000	6,841,215,345	98.42	109,854,655
53	BELANJA MODAL							
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	199,645,000	199,134,111	0	199,134,111	99.74	510,889
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	0	199,645,000	199,134,111	0	199,134,111	99.74	510,889
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	0	199,645,000	199,134,111	0	199,134,111	99.74	510,889
	JUMLAH BELANJA	42,525,149,000	48,974,451,000	48,727,509,027	48,358,245	48,679,150,782	99.4	295,300,218

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 005**	**MAHKAMAH AGUNG**
ESELON I	**: 01**	**BADAN URUSAN ADMINISTRASI**
WILAYAH/PROVINSI	**: 005010300KD**	**JAWA TENGAH**
SATUAN KERJA	**: 097713**	**PENGADILAN TINGGI SEMARANG**
JENIS SATUAN KERJA	**: KD**	

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 08/05/25 10:38 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_sgo_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
01	RUPIAH MURNI							
1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah							
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal							
53	BELANJA MODAL							
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	199,645,000	199,134,111	0	199,134,111	99.74	510,889
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	0	199,645,000	199,134,111	0	199,134,111	99.74	510,889
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	0	199,645,000	199,134,111	0	199,134,111	99.74	510,889
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 1071.EBB	0	199,645,000	199,134,111	0	199,134,111	99.744	510,889
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN1071	0	199,645,000	199,134,111	0	199,134,111	99.74	510,889
6986	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan							
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal							
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	9,018,883,000	9,430,984,000	9,421,211,000	0	9,421,211,000	99.9	9,773,000
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	93,000	120,000	118,159	3,245	114,914	95.76	5,086
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	587,149,000	675,718,000	665,715,882	0	665,715,882	98.52	10,002,118
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	78,019,000	70,602,000	67,601,442	0	67,601,442	95.75	3,000,558
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	113,561,000	111,020,000	111,020,000	0	111,020,000	100	0
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	18,825,761,000	23,815,281,000	23,745,732,000	34,560,000	23,711,172,000	99.56	104,109,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	3,476,905,000	4,827,999,000	4,817,422,543	0	4,817,422,543	99.78	10,576,457
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	278,723,000	285,000,000	281,858,640	0	281,858,640	98.9	3,141,360
511129	Belanja Uang Makan PNS	1,435,368,000	1,184,479,000	1,152,704,000	0	1,152,704,000	97.32	31,775,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	123,476,000	67,335,000	65,905,000	185,000	65,720,000	97.6	1,615,000
511158	Belanja Tunjangan Hakim Ad Hoc	1,833,701,000	1,164,500,000	1,158,150,000	0	1,158,150,000	99.45	6,350,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	35,771,639,000	41,633,038,000	41,487,438,666	34,748,245	41,452,690,421	99.65	180,347,579
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	0	134,552,000	134,551,200	0	134,551,200	100	800
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0	4,000	2,145	0	2,145	53.63	1,855
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	0	4,491,000	4,485,040	0	4,485,040	99.87	5,960
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	0	502,000	0	0	0	0	502,000
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	0	21,742,000	21,742,000	0	21,742,000	100	0
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	0	4,056,000	4,055,520	0	4,055,520	99.99	480
511628	Belanja Uang Makan PPPK	0	25,351,000	21,275,000	0	21,275,000	83.92	4,076,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 005**	**MAHKAMAH AGUNG**
ESELON I	**: 01**	**BADAN URUSAN ADMINISTRASI**
WILAYAH/PROVINSI	**: 005010300KD**	**JAWA TENGAH**
SATUAN KERJA	**: 097713**	**PENGADILAN TINGGI SEMARANG**
JENIS SATUAN KERJA	**: KD**	

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 08/05/25 10:38 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_sgo_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	0	190,698,000	186,110,905	0	186,110,905	97.59	4,587,095
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	35,771,639,000	41,823,736,000	41,673,549,571	34,748,245	41,638,801,326	99.64	184,934,674
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	710,221,000	742,344,000	725,163,625	0	725,163,625	97.69	17,180,375
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	30,000,000	30,000,000	29,948,785	0	29,948,785	99.83	51,215
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	88,176,000	92,880,000	89,744,000	0	89,744,000	96.62	3,136,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	101,969,000	106,365,000	101,700,110	0	101,700,110	95.61	4,664,890
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	930,366,000	971,589,000	946,556,520	0	946,556,520	97.42	25,032,480
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	9,000,000	8,720,200	0	8,720,200	96.89	279,800
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	0	9,000,000	8,720,200	0	8,720,200	96.89	279,800
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	136,720,000	217,550,000	217,484,900	0	217,484,900	99.97	65,100
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	136,720,000	217,550,000	217,484,900	0	217,484,900	99.97	65,100
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	3,000,000	3,000,000	714,900	0	714,900	23.83	2,285,100
522112	Belanja Langganan Telepon	12,000,000	12,000,000	8,232,416	0	8,232,416	68.6	3,767,584
522113	Belanja Langganan Air	48,000,000	39,600,000	37,656,400	0	37,656,400	95.09	1,943,600
522141	Belanja Sewa	3,662,680,000	3,670,266,000	3,649,202,781	13,010,000	3,636,192,781	99.07	34,073,219
522191	Belanja Jasa Lainnya	4,000,000	5,500,000	5,500,000	0	5,500,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	3,729,680,000	3,730,366,000	3,701,306,497	13,010,000	3,688,296,497	99.22	42,069,503
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	689,559,000	853,860,000	853,721,949	0	853,721,949	99.98	138,051
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	74,981,000	74,981,000	74,881,083	0	74,881,083	99.87	99,917
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	643,179,000	568,263,000	565,915,935	0	565,915,935	99.59	2,347,065
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	1,407,719,000	1,497,104,000	1,494,518,967	0	1,494,518,967	99.83	2,585,033
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	540,475,000	436,511,000	404,188,261	600,000	403,588,261	92.46	32,922,739
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8,550,000	10,950,000	4,050,000	0	4,050,000	36.99	6,900,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	78,000,000	78,000,000	0	78,000,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	549,025,000	525,461,000	486,238,261	600,000	485,638,261	92.54	39,822,739
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	6,753,510,000	6,951,070,000	6,854,825,345	13,610,000	6,841,215,345	98.62	109,854,655

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 005**	**MAHKAMAH AGUNG**
ESELON I	**: 01**	**BADAN URUSAN ADMINISTRASI**
WILAYAH/PROVINSI	**: 005010300KD**	**JAWA TENGAH**
SATUAN KERJA	**: 097713**	**PENGADILAN TINGGI SEMARANG**
JENIS SATUAN KERJA	**: KD**	

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 08/05/25 10:38 PM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_sgo_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 6986.EBA	42,525,149,000	48,774,806,000	48,528,374,916	48,358,245	48,480,016,671	99.495	294,789,329
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN6986	42,525,149,000	48,774,806,000	48,528,374,916	48,358,245	48,480,016,671	99.49	294,789,329
	JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 01	42,525,149,000	48,974,451,000	48,727,509,027	48,358,245	48,679,150,782	99.5	295,300,218
	JUMLAH BELANJA	42,525,149,000	48,974,451,000	48,727,509,027	48,358,245	48,679,150,782	99.5	295,300,218

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 005**	**MAHKAMAH AGUNG**
ESELON I	**: 01**	**BADAN URUSAN ADMINISTRASI**
WILAYAH/PROVINSI	**: 0300**	**JAWA TENGAH**
SATUAN KERJA	**: 097713**	**PENGADILAN TINGGI SEMARANG**

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 08/05/25 10:37 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	45,466,000	22,274,292	0	22,274,292	48.99
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	45,466,000	22,274,292	0	22,274,292	48.99
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	2,454,270	0	2,454,270	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	2,454,270	0	2,454,270	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	45,466,000	24,728,562	0	24,728,562	54.39
	JUMLAH PENDAPATAN	45,466,000	24,728,562	0	24,728,562	54.39

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

Kode Lap : LRA.B.E1.2
Tanggal : 08/05/25 10:37 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_prog_giat_satker_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
SATUAN KERJA : 097713 PENGADILAN TINGGI SEMARANG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
01	**RUPIAH MURNI**							
WA	Program Dukungan Manajemen							
1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	0	199,645,000	199,134,111	0	199,134,111	99.74	510,889
6986	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	42,525,149,000	48,774,806,000	48,528,374,916	48,358,245	48,480,016,671	99.49	294,789,329
	JUMLAH BELANJA PROGRAM WA	**42,525,149,000**	**48,974,451,000**	**48,727,509,027**	**48,358,245**	**48,679,150,782**	**99.5**	**295,300,218**
	JUMLAH BELANJA RUPIAH MURNI	**42,525,149,000**	**48,974,451,000**	**48,727,509,027**	**48,358,245**	**48,679,150,782**	**99.5**	**295,300,218**
	JUMLAH	**42,525,149,000**	**48,974,451,000**	**48,727,509,027**	**48,358,245**	**48,679,150,782**	**99.5**	**295,300,218**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN
S.D BULAN 2024

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 08/05/25 10:37 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_sd_jb_akun_satker_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

SATUAN KERJA : 097713 PENGADILAN TINGGI SEMARANG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
01	**RUPIAH MURNI**							
51	**BELANJA PEGAWAI**							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	9,018,883,000	9,430,984,000	9,421,211,000	0	9,421,211,000	99.9	9,773,000
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	93,000	120,000	118,159	3,245	114,914	95.76	5,086
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	587,149,000	675,718,000	665,715,882	0	665,715,882	98.52	10,002,118
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	78,019,000	70,602,000	67,601,442	0	67,601,442	95.75	3,000,558
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	113,561,000	111,020,000	111,020,000	0	111,020,000	100	0
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	18,825,761,000	23,815,281,000	23,745,732,000	34,560,000	23,711,172,000	99.56	104,109,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	3,476,905,000	4,827,999,000	4,817,422,543	0	4,817,422,543	99.78	10,576,457
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	278,723,000	285,000,000	281,858,640	0	281,858,640	98.9	3,141,360
511129	Belanja Uang Makan PNS	1,435,368,000	1,184,479,000	1,152,704,000	0	1,152,704,000	97.32	31,775,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	123,476,000	67,335,000	65,905,000	185,000	65,720,000	97.6	1,615,000
511158	Belanja Tunjangan Hakim Ad Hoc	1,833,701,000	1,164,500,000	1,158,150,000	0	1,158,150,000	99.45	6,350,000
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	0	134,552,000	134,551,200	0	134,551,200	100	800
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0	4,000	2,145	0	2,145	53.63	1,855
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	0	4,491,000	4,485,040	0	4,485,040	99.87	5,960
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	0	502,000	0	0	0	0	502,000
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	0	21,742,000	21,742,000	0	21,742,000	100	0
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	0	4,056,000	4,055,520	0	4,055,520	99.99	480
511628	Belanja Uang Makan PPPK	0	25,351,000	21,275,000	0	21,275,000	83.92	4,076,000
	JUMLAH BELANJA PEGAWAI	**35,771,639,000**	**41,823,736,000**	**41,673,549,571**	**34,748,245**	**41,638,801,326**	**99.64**	**184,934,674**
52	**BELANJA BARANG**							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	710,221,000	742,344,000	725,163,625	0	725,163,625	97.69	17,180,375
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	30,000,000	30,000,000	29,948,785	0	29,948,785	99.83	51,215
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	88,176,000	92,880,000	89,744,000	0	89,744,000	96.62	3,136,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	101,969,000	106,365,000	101,700,110	0	101,700,110	95.61	4,664,890
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	9,000,000	8,720,200	0	8,720,200	96.89	279,800
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	136,720,000	217,550,000	217,484,900	0	217,484,900	99.97	65,100
522111	Belanja Langganan Listrik	3,000,000	3,000,000	714,900	0	714,900	23.83	2,285,100
522112	Belanja Langganan Telepon	12,000,000	12,000,000	8,232,416	0	8,232,416	68.6	3,767,584
522113	Belanja Langganan Air	48,000,000	39,600,000	37,656,400	0	37,656,400	95.09	1,943,600
522141	Belanja Sewa	3,662,680,000	3,670,266,000	3,649,202,781	13,010,000	3,636,192,781	99.07	34,073,219
522191	Belanja Jasa Lainnya	4,000,000	5,500,000	5,500,000	0	5,500,000	100	0
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	689,559,000	853,860,000	853,721,949	0	853,721,949	99.98	138,051
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	74,981,000	74,981,000	74,881,083	0	74,881,083	99.87	99,917
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	643,179,000	568,263,000	565,915,935	0	565,915,935	99.59	2,347,065
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	540,475,000	436,511,000	404,188,261	600,000	403,588,261	92.46	32,922,739
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8,550,000	10,950,000	4,050,000	0	4,050,000	36.99	6,900,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	78,000,000	78,000,000	0	78,000,000	100	0
	JUMLAH BELANJA BARANG	**6,753,510,000**	**6,951,070,000**	**6,854,825,345**	**13,610,000**	**6,841,215,345**	**98.62**	**109,854,655**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN
S.D BULAN 2024

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 08/05/25 10:37 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_sd_jb_akun_satker_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
SATUAN KERJA : 097713 PENGADILAN TINGGI SEMARANG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
53	**BELANJA MODAL**							
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	199,645,000	199,134,111	0	199,134,111	99.74	510,889
	JUMLAH BELANJA MODAL	**0**	**199,645,000**	**199,134,111**	**0**	**199,134,111**	**99.74**	**510,889**
	JUMLAH RUPIAH MURNI	**42,525,149,000**	**48,974,451,000**	**48,727,509,027**	**48,358,245**	**48,679,150,782**	**99.5**	**295,300,218**
	TOTAL	**42,525,149,000**	**48,974,451,000**	**48,727,509,027**	**48,358,245**	**48,679,150,782**	**99.5**	**295,300,218**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 005**	**MAHKAMAH AGUNG**
ESELON I	**: 01**	**BADAN URUSAN ADMINISTRASI**
WILAYAH/PROVINSI	**: 0300**	**JAWA TENGAH**
SATUAN KERJA	**: 097713**	**PENGADILAN TINGGI SEMARANG**
JENIS SATUAN KERJA	**: KD**	

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 08/05/25 10:36 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 8/5/25 10:30 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	9,018,883,000	9,430,984,000	9,421,211,000	0	9,421,211,000	99.9	9,773,000
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	93,000	120,000	118,159	3,245	114,914	95.76	5,086
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	587,149,000	675,718,000	665,715,882	0	665,715,882	98.52	10,002,118
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	78,019,000	70,602,000	67,601,442	0	67,601,442	95.75	3,000,558
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	113,561,000	111,020,000	111,020,000	0	111,020,000	100	0
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	18,825,761,000	23,815,281,000	23,745,732,000	34,560,000	23,711,172,000	99.56	104,109,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	3,476,905,000	4,827,999,000	4,817,422,543	0	4,817,422,543	99.78	10,576,457
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	278,723,000	285,000,000	281,858,640	0	281,858,640	98.9	3,141,360
511129	Belanja Uang Makan PNS	1,435,368,000	1,184,479,000	1,152,704,000	0	1,152,704,000	97.32	31,775,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	123,476,000	67,335,000	65,905,000	185,000	65,720,000	97.6	1,615,000
511158	Belanja Tunjangan Hakim Ad Hoc	1,833,701,000	1,164,500,000	1,158,150,000	0	1,158,150,000	99.45	6,350,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	35,771,639,000	41,633,038,000	41,487,438,666	34,748,245	41,452,690,421	99.57	180,347,579
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	0	134,552,000	134,551,200	0	134,551,200	100	800
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0	4,000	2,145	0	2,145	53.62	1,855
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	0	4,491,000	4,485,040	0	4,485,040	99.87	5,960
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	0	502,000	0	0	0	0	502,000
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	0	21,742,000	21,742,000	0	21,742,000	100	0
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	0	4,056,000	4,055,520	0	4,055,520	99.99	480
511628	Belanja Uang Makan PPPK	0	25,351,000	21,275,000	0	21,275,000	83.92	4,076,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	0	190,698,000	186,110,905	0	186,110,905	97.59	4,587,095
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	35,771,639,000	41,823,736,000	41,673,549,571	34,748,245	41,638,801,326	99.56	184,934,674
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	710,221,000	742,344,000	725,163,625	0	725,163,625	97.69	17,180,375
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	30,000,000	30,000,000	29,948,785	0	29,948,785	99.83	51,215
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	88,176,000	92,880,000	89,744,000	0	89,744,000	96.62	3,136,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	101,969,000	106,365,000	101,700,110	0	101,700,110	95.61	4,664,890
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	930,366,000	971,589,000	946,556,520	0	946,556,520	97.42	25,032,480
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	9,000,000	8,720,200	0	8,720,200	96.89	279,800
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	0	9,000,000	8,720,200	0	8,720,200	96.89	279,800

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 005**	**MAHKAMAH AGUNG**
ESELON I	**: 01**	**BADAN URUSAN ADMINISTRASI**
WILAYAH/PROVINSI	**: 0300**	**JAWA TENGAH**
SATUAN KERJA	**: 097713**	**PENGADILAN TINGGI SEMARANG**
JENIS SATUAN KERJA	**: KD**	

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 08/05/25 10:36 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 8/5/25 10:30 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	136,720,000	217,550,000	217,484,900	0	217,484,900	99.97	65,100
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	136,720,000	217,550,000	217,484,900	0	217,484,900	99.97	65,100
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	3,000,000	3,000,000	714,900	0	714,900	23.83	2,285,100
522112	Belanja Langganan Telepon	12,000,000	12,000,000	8,232,416	0	8,232,416	68.6	3,767,584
522113	Belanja Langganan Air	48,000,000	39,600,000	37,656,400	0	37,656,400	95.09	1,943,600
522141	Belanja Sewa	3,662,680,000	3,670,266,000	3,649,202,781	13,010,000	3,636,192,781	99.07	34,073,219
522191	Belanja Jasa Lainnya	4,000,000	5,500,000	5,500,000	0	5,500,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	3,729,680,000	3,730,366,000	3,701,306,497	13,010,000	3,688,296,497	98.87	42,069,503
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	689,559,000	853,860,000	853,721,949	0	853,721,949	99.98	138,051
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	74,981,000	74,981,000	74,881,083	0	74,881,083	99.87	99,917
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	643,179,000	568,263,000	565,915,935	0	565,915,935	99.59	2,347,065
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	1,407,719,000	1,497,104,000	1,494,518,967	0	1,494,518,967	99.83	2,585,033
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	540,475,000	436,511,000	404,188,261	600,000	403,588,261	92.46	32,922,739
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8,550,000	10,950,000	4,050,000	0	4,050,000	36.99	6,900,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	78,000,000	78,000,000	0	78,000,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	549,025,000	525,461,000	486,238,261	600,000	485,638,261	92.42	39,822,739
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	6,753,510,000	6,951,070,000	6,854,825,345	13,610,000	6,841,215,345	98.42	109,854,655
53	BELANJA MODAL							
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	199,645,000	199,134,111	0	199,134,111	99.74	510,889
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	0	199,645,000	199,134,111	0	199,134,111	99.74	510,889
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	0	199,645,000	199,134,111	0	199,134,111	99.74	510,889
	JUMLAH BELANJA	42,525,149,000	48,974,451,000	48,727,509,027	48,358,245	48,679,150,782	99.4	295,300,218

1. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat UAKPA

KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)
TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2024

Kode dan Nama UAKPA : (097713) PENGADILAN TINGGI SEMARANG
Kode dan Nama UAPPAW : (005.01.0300.097713) PENGADILAN TINGGI SEMARANG
Kode dan Nama Eselon 1 : (005.01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG RI
Kode dan Nama K/L : (005) MAHKAMAH AGUNG

	Objek Penelaahan	**Kondisi LK**		**Seharusnya**
Beri tanda centang (√) sesuai Laporan Keuangan.Jika tidak ada data, isi dengan N/A				
Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran				
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN				
	Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Pernyataan Tanggung Jawab	√		Ada
2	Face LRA, Neraca, LO dan LPE	√		Ada
3	Catatan atas Laporan Keuangan	√		Ada
	Laporan Keuangan Tambahan	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Neraca Percobaan Akrual Saldo Awal	√		Ada
2	Neraca Percobaan Akrual	√		Ada
3	Neraca Percobaan Kas	√		Ada
4	Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun	√		Ada
KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/MONSAKTI				
	Kesesuaian Saldo	**Sama**	**Tidak**	**Seharusnya**
1.	Semua *face* laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan cetakan laporan pada SAKTI/MONSAKTI	√		Sama
Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/MONSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.				
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI				
	Persamaan Dasar Akuntansi	**Sama**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE	√		Sama
2	Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca	√		Sama
3	Neraca : Aset = Kewajiban + Ekuitas	√		Sama
PENGECEKAN PADA MONSAKTI				
	To Do List	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Terdapat Pagu Minus per tgl pelaporan		√	Tidak
2	Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi (dalam hal masih terdapat	√		Ya
3	Terdapat Persediaan Belum Didetilkan per tanggal pelaporan		√	Tidak
4	Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan		√	Tidak
5	Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (Jika ada,		√	Tidak
6	Terdapat Aset Belum Didetilkan per tanggal pelaporan		√	Tidak
7	Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan		√	Tidak
8	Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan		√	Tidak
9	Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan		√	Tidak
10	Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan		√	Tidak
11	Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan		√	Tidak
12	Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan		√	Tidak
Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah				
	Rekon SAKTI-SPAN *(Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)*	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Adakah "TDK RUPIAH" yang BEDA?		√	Tidak
2	Adakah "TDK COA" yang BEDA?		√	Tidak
3	Adakah "TDK DETAIL" yang BEDA?		√	Tidak
	a. Pagu/DIPA		√	Tidak
	b. Estimasi PNBP		√	Tidak
	c. Belanja		√	Tidak

	d. Pengembangan Belanja		√	Tidak
	e. Pendapatan		√	Tidak
	f. Pengembangan Belanja		√	Tidak
	g. Kas BLU		√	Tidak
	h. Kas di Bendahara Pengeluaran		√	Tidak
	i. Kas Hibah		√	Tidak
	j. Pengesahan Hibah Langsung		√	Tidak
	Rekon Internal	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Terdapat Selisih Rekon Internal		√	Tidak
	Daftar MONSAKTI	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak normal		√	Ada/Tidak
2	Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun 'belum diregsiter)		√	Ada/Tidak
3	Adakah Neraca Tidak Balance?		√	Tidak
4	Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)		√	Tidak
5	Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?		√	Tidak
6	Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)		√	Tidak
	PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL			
	Pengecekan Saldo Neraca Percobaan	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1.	Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akrual		√	Tidak
2	Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas		√	Tidak
3	Terdapat Saldo bernilai desimal		√	Tidak
	Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)	√		Ya
2	Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)	√		Ya
3	Akun Kewajiban (2xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
4	Akun Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
5	Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (D)	√		Ya
6	Akun Belanja/Beban (5xxxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)	√		Ya
7	Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
	Akun-Akun yang tidak boleh ada	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		√	Ada/Tidak
2	Terdapat Akun 1111xx hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari		√	Tidak
3	Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka		√	Tidak
4	Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		√	Tidak
5	Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"		√	Tidak
6	Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		√	Tidak
7	Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		√	Tidak
8	Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Hibah)		√	Tidak
9	Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN		√	Tidak
10	Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/719/745/772/773/774/815/816/998)		√	Tidak
11	Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban		√	Tidak
12	Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)		√	Tidak
13	Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi yang		√	Tidak
	Jika Bukan Satker BLU	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Terdapat akun Neraca (1xxxxx dan 2xxxxx) dengan uraian frasa "BLU"		√	Tidak
2	Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU)		√	Tidak
3	Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU)		√	Tidak
4	Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU)		√	Tidak
	Terkait Satker BLU	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**

1	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		√	Ada/Tidak
	Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah			
2	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu		√	Tidak
	Pengecekan akun yang tidak sesuai karasteristik tupoksi entitas	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada persediaan/realisasi belanja dalam		√	Tidak
2	Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di RRI dan POLRI		√	Tidak
	Hibah Langsung	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
	Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/ barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke		√	Ada/Tidak
1	Adakah akun 218211 (hibah Langsung Yang Belum Disahkan), akun 218211 hanya boleh muncul		√	Ada/Tidak
2	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)		√	Ada/Tidak
3	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133-Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)	√		Ya
4	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?	√		Ya
5	Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) ?	√		Ya
	Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		√	Ada/Tidak
1	Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang			Ya
	Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal			
1	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MONSAKTI	**0**		
2	Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)	**0**		
3	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu		√	Tidak
	Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Apakah terdapat Akun 425913 pada **Neraca Percobaan Kas?**		√	Ya/Tidak
2	Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?		√	Ya/Tidak
3	Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual pada		√	Ya
	Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		√	Ya/Tidak
2	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun		√	Ya/Tidak
	Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam Calk			
	Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan dalam catatan telaah		√	Ya/Tidak
	PENGECEKAN NERACA			
	Pengecekan Pos-pos Neraca	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Saldo Awal 1 Jan 20XX di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya	√		Ya
2	Saldo pada neraca bernilai wajar	√		Ya
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	√		Ya
4	Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening	√		Ya
5	Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan	√		Ya
6	Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?		√	Tidak
7	Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumya, apakah asetnya mengalami peningkatan?	√		Ya
8	Terdapat saldo bernilai desimal		√	Tidak
	PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL			
	Pengecekan Pos-pos LO	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)		√	Tidak
2	Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi (55xxxx), beban hibah (56xxxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxxx) , atau akun-		√	Tidak
3	Terdapat kodefikasi atau uraian akun null		√	Tidak
4	Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang	√		Ya

5	Bandingkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya, apakah terdapat		√	Ya/Tidak
6	Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar	√		Ya/Tidak
7	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?	√		Tidak
	PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS			
	Pengecekan Pos-pos LPE	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	"Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	√		Ya
2	Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya		√	Ya/Tidak
3	Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek		√	Tidak
4	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
	Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?	√		Ya
	Contoh : Pengungkapan 391116 senilai Rp151.500.000 disebakan oleh transaksi saldo awal			
2	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar entitas	√		Ya
	PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)			
	Pengecekan Pos-pos LRA/B/P	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Terdapat saldo negatif di LRAB		√	Tidak
2	Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)		√	Tidak
3	Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya		√	Tidak
4	Terdapat uraian Jenis Belanja “Tidak Ada”		√	Tidak
5	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
6	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti		√	Ya/Tidak
7	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah		√	Ya
	TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN			
	Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun :		√	Ya/Tidak
	- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca)		√	Ya/Tidak
	- Beban Penyisihan Piutang (di LO)		√	Ya/Tidak
	- Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang		√	Ya/Tidak
2	Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun :		√	Ya/Tidak
	- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		√	Ya/Tidak
3	Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun :	√		Ya/Tidak
	- Beban Persediaan (di LO)	√		Ya/Tidak
4	Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun :	√		Ya/Tidak
	- Akumulasi AT/AL (Neraca)	√		Ya/Tidak
	- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	√		Ya/Tidak
5	Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akrual?		√	Ya/Tidak
	Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?		-	Ya
	Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat & Beban Bansos	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat ?		√	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas		√	Ya
2	Apakah ada Beban Bansos ?		√	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas		√	Ya
	Pengecekan Jurnal Manual Akrual pada Modul GLP (Jika Ada, Karwas dan/atau Memo Harus	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan Akrual		√	Ya/Tidak
2	Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492X)		√	Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan Akrual			Ya/Tidak
3	Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan Akrual		√	Ya/Tidak
4	Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9)	√		Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan Akrual	√		Ya/Tidak
5	Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan Akrual	√		Ya/Tidak
	TELAAH LK BLU			
	LPSAL BLU	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Apakah nilai LPSAL sudah sesuai?	√		Ya
2	Apakah nilai pendapatan alokasi APBN bernilai minus?		√	Tidak

3	Apakah formula perhitugnan SAL pada LPSAL telah sesuai?	√		Ya
4	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX,	√		Ya
5	Apakah Nilai SiLPA/SiKPA pada LPSAL = Nilai Surplus/(defisit) pada LRA	√		Ya
6	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX,	√		Ya
	LAK BLU	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Apakah Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun 1119xx, 111826, 1133xx, 165111, dan 166213	√		Ya
2	Apakah Saldo Akhir Kas LAK = Jumlah Rincian Saldo Akhir Kas LAK?	√		Ya
3	Apakah Saldo Akhir Kas pada BLU = Kas pada BLU di Neraca	√		Ya
4	Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas = Saldo Kas Lainnya di BLU (111826) pada Neraca	√		Ya
5	Investasi Jangka Pendek BLU = Investasi Jangka Pendek BLU pada Neraca	√		Ya
6	Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU = Dana Kelolaan BLU pada Neraca	√		Ya
7	Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) = Saldo akun 111914 pada Neraca Percobaan	√		Ya

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk

Mengetahui
Pejabat Penyusun LKKL,

Muhamad Ashar
NIP 196801141995031002

Semarang, 7 Mei 2025
Penelaah,

Effita Dewi Saraswati
NIP 198707312009122003